



RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas bimbingan dan Karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019 dapat di selesaikan dengan tepat waktu. Rencana Kerja (Renja) mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan dan pertanggungjawaban Kepala SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, disusun sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian data maupun kualitas informasi yang disampaikan . Oleh karena itu, segala kritik dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya dokumen ini sangat kami harapkan.

Slawi Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal

RETNO SUPROBOWATI, SH.MM.M.Kn.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601101 198603 2 008

DAFTAR ISI
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL 2018

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I **Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dikbud Tahun 2017**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dikbud Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Dikbud
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
 - 2.2.1 Rata-rata Lama Sekolah atau Rata-rata Lama Belajar
 - 2.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
 - 2.2.3 Kualifikasi Tenaga Pendidik sekurang-kurangnya S1/DIV
 - 2.2.4 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/ Sederajat dalam Kategori Baik
 - 2.2.5 Angka Melek Huruf (AMH)
 - 2.2.6 Angka Melanjutkan (AM) Ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi
 - 2.2.7 Persentase ruang kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sesuai SPM
 - 2.2.8 Persentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA memiliki sanitasi yang layak
 - 2.2.9 Angka Lulusan (AL)
 - 2.2.10 Capaian Bidang Pemuda dan Olahraga
- 2.3 Issu-issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Usulan program dan kegiatan masyarakat

- BAB III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
- 3.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - 3.2 Tujuan dan sasaran rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

Lampiran - lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Target dan Capaian Rata-rata Lama Sekolah
Gambar 2	Grafik Angka Putus Sekolah
Gambar 3	Grafik Capaian APM Dinas Dikbud Kabupaten Tegal
Gambar 4	Grafik Capaian APK Dinas Dikbud Kabupaten Tegal
Gambar 5	Grafik Keberadaan guru menurut status kepegawaian , jenjang pendidikan dan sertifikasi
Gambar 6	Grafik Kondisi Gedung Sekolah
Gambar 7	Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui anggaran APBN
Gambar 8	Grafik capaian Angka Melek huruf usia > 45 Tahun
Gambar 9	Grafik angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA
Gambar 10	Struktur Organisasi Dinas Dikbud Kabupaten Tegal

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-rata Lama Sekolah
Tabel 2.2	Angka Putus Sekolah
Tabel 2.3	Perkembangan APM dan APK
Tabel 2.4	Kondisi Gedung Sekolah
Tabel 2.5	Angka Melek Huruf
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2018

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Lampiran 2	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Dikbud Kabupaten Tegal.
Lampiran 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Lampiran 4	Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Tahun 2017
Lampiran 5	Rekap DPA 2.2 Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan Negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan tenaga kerja menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen dengan asumsi yang lain tetap (*ceteris paribus*) Sementara itu kenaikan 1,0 persen rata-rata jam tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 persen dengan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen.

Di lain pihak kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan.

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya.

Pendidikan adalah sebuah proses untuk menumbuhkan sisi kepribadian masyarakat secara seimbang dan menyeluruh. Pendidikan akan menjadi pilar kebangkitan. Daerah yang menginginkan kebangkitan harus menyiapkan perencanaan pembangunan pendidikan secara menyeluruh dengan menyiapkan dan memelihara sarana pendidikan secara massal. Muridnya adalah seluruh warga negara dan gurunya adalah pemimpin dan para birokrat, sementara ilmunya adalah hak-hak dan kewajiban sosial. Sebagai guru maka Pemerintah dan Pembantunya (Birokrat) harus memperoleh pendidikannya terlebih dahulu dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara.

Empat hal yang menyangkut perencanaan pendidikan, yaitu: (a) tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan, (b) keadaan yang terjadi sekarang, (c) alternatif pilihan kebijakan dan prioritas dalam mencapai tujuan, dan (d) strategi penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

Perencanaan merupakan alat pengubah dan pengendali perubahan, sedangkan pembangunan artinya mengubah untuk maju dan berkembang menuju arah tertentu. Ini berarti setiap upaya pembangunan memerlukan perencanaan dan setiap perencanaan adalah untuk mewujudkan upaya pembangunan. Maka dari itu, guna mencapai hasil pembangunan pendidikan yang terarah dan tepat sasaran, diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan di bidang pendidikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pada Tahun 2019.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2018;
39. Keputusan Bupati Tegal Nomor 1059 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019 ini dimaksud sebagai rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dibuat dalam satu dokumen perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal Tahun 2019.

Dengan tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019 maka akan diketahui rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran, serta efisien dalam penggunaan anggaran. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Tahun 2019 juga akan menyelaraskan tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan karakteristik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Tegal serta mensinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019, yang antara lain memuat permasalahan yang terjadi sehingga diperlukannya suatu dokumen perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Tegal. Bab ini juga memuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

Bab ini menjelaskan tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD Kabupaten Tegal Tahun 2017 yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Tahun 2019 ini, sudah disahkan. Selain itu, juga berisi pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Selain itu, berisi

juga perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Pada Bab ini juga disampaikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah untuk

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, berisi kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2017

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2017 dan
 Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

URUSAN PENDIDIKAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Target Renstra 2019 (Rp. 000)	Target 2017 (Rp. 000)	Realisasi 2017 (Rp. 000)	Presentase Pencapaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PENDIDIKAN						
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.081.000.000	2.636.200.000	2.145.697.091	81,39	Tinggi
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000	8.000.000	7.998.000	99,98	Sangat Tinggi
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.500.000.000	320.000.000	163.321.560	51,04	Rendah
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.241.000.000	448.200.000	308.360.000	68,80	Sedang
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	750.000.000	150.000.000	147.910.500	98,61	Sangat Tinggi
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	875.000.000	175.000.000	168.377.800	96,22	Sangat Tinggi
	6 Penyediaan alat tulis kantor	1.000.000.000	200.000.000	133.139.200	66,57	Sedang
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450.000.000	90.000.000	86.041.000	95,60	Sangat Tinggi
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	500.000.000	100.000.000	95.243.500	95,24	Sangat Tinggi
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	375.000.000	75.000.000	63.818.900	85,09	Tinggi
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	125.000.000	25.000.000	13.920.000	55,68	Rendah
	11 Penyediaan makanan dan minuman	1.250.000.000	250.000.000	246.918.000	98,77	Sangat Tinggi
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	750.000.000	150.000.000	149.667.521	99,78	Sangat Tinggi
	13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	14 Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor	625.000.000	125.000.000	122.162.500	97,73	Sangat Tinggi
	15 Biaya Operasional Kegiatan UPTD Dikpora Kecamatan dan SKB	2.500.000.000	500.000.000	418.818.610	83,76	Tinggi

	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.275.000.000	1.167.442.000	1.104.155.547	94,58	Sangat Tinggi
		1 Pengadaan mebeleur	150.000.000	85.500.000	82.348.000	96,31	Sangat Tinggi
		2 Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	750.000.000	406.942.000	394.768.230	97,01	Sangat Tinggi
		3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.000.000.000	200.000.000	193.192.000	96,60	Sangat Tinggi
		4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.000.000.000	200.000.000	172.554.517	86,28	Tinggi
		5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	375.000.000	75.000.000	67.648.800	90,20	Tinggi
		6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.000.000.000	200.000.000	193.644.000	96,82	Sangat Tinggi
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000	50.000.000	40.708.500	81,42	Tinggi
		1 Pendidikan dan pelatihan formal	250.000.000	50.000.000	40.708.500	81,42	Tinggi
	4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.400.000.000	315.775.000	305.947.750	96,89	Sangat Tinggi
		1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	250.000.000	50.000.000	46.426.750	92,85	Sangat Tinggi
		2 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	1.150.000.000	265.775.000	259.521.000	97,65	Sangat Tinggi
	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	8.340.300.000	1.963.060.000	1.822.338.550	92,83	Sangat Tinggi
		1 Pembangunan gedung sekolah	1.415.300.000	283.060.000	277.354.850	97,98	Sangat Tinggi
		2 Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal	675.000.000	135.000.000	134.809.000	99,86	Sangat Tinggi
		3		120.000.000	120.000.000	100,00	Sangat Tinggi
		4 Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Nonformal	1.000.000.000	200.000.000	196.707.000	98,35	Sangat Tinggi
		5 Pengadaan Meubelair PAUD Nonformal	750.000.000	150.000.000	147.482.000	98,32	Sangat Tinggi
		6 Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	1.000.000.000	200.000.000	198.932.000	99,47	Sangat Tinggi
		7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos PAUD (APE Indoor dan APE Outdoor)	125.000.000	25.000.000	24.140.000	96,56	Sangat Tinggi
		8 Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	375.000.000	75.000.000	60.710.000	80,95	Tinggi
		9 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa Bantuan Provinsi Tahun 2014)	3.000.000.000	640.000.000	537.326.000	83,96	Tinggi
		10 Penyempurnaan Ruang Kelas TK dan PKBM		75.000.000	74.500.000	99,33	Sangat Tinggi
		11 Operasional Pendirian PAUD		60.000.000	50.377.700	83,96	Tinggi

	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		209.844.650.000	43.823.719.000	42.116.157.969	96,10	Sangat Tinggi
		1	Pengadaan mebeluer sekolah	3.951.400.000	790.280.000	671.053.000	84,91	Tinggi
		2	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten	625.000.000	125.000.000	121.500.000	97,20	Sangat Tinggi
		3	Regrouping SD	125.000.000	25.000.000	-	0,00	Sangat Rendah
		4	Penataan Lingkungan Sekolah	12.875.000.000	3.334.500.000	3.301.432.750	99,01	Sangat Tinggi
		5	Pengadaan Peralatan TIK SMP	6.000.000.000	1.200.000.000	1.177.863.000	98,16	Sangat Tinggi
		6	Latihan Ujian Nasional SMP / Try Out SMP/MTs	300.000.000	60.000.000	49.382.750	82,30	Tinggi
		7	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / SMPLB / MTs	2.000.000.000	400.000.000	301.011.000	75,25	Sedang
		8	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal	500.000.000	100.000.000	90.548.000	90,55	Tinggi
		9	Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP	250.000.000	50.000.000	42.157.000	84,31	Tinggi
		10	Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal	125.000.000	25.000.000	10.270.000	41,08	Sangat Rendah
		11	Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas	100.000.000	20.000.000	17.271.000	86,36	Tinggi
		12	Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP	100.000.000	20.000.000	19.057.500	95,29	Sangat Tinggi
		13	Pengembangan Kegiatan 11 Mata Pelajaran MGMP Kabupaten Tegal	650.000.000	130.000.000	122.692.000	94,38	Sangat Tinggi
		14	Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	150.000.000	30.000.000	19.745.000	65,82	Rendah
		15	Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal	375.000.000	75.000.000	-	0,00	Sangat Rendah
		16	Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	100.000.000	20.000.000	14.043.000	70,22	Sedang
		17	Pelatihan Kurikulum SD	250.000.000	50.000.000	48.926.500	97,85	Sangat Tinggi
		18	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA	150.000.000	30.000.000	25.892.000	86,31	Tinggi
		19	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB	2.375.000.000	675.000.000	648.827.100	96,12	Sangat Tinggi
		20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi	1.683.250.000	336.650.000	323.917.000	96,22	Sangat Tinggi
		21	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	450.000.000	90.000.000	79.092.000	87,88	Tinggi
		22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)	1.000.000.000	200.000.000	140.556.000	70,28	Sedang

	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah SD (DAK)	45.370.000.000	9.074.000.000	8.475.746.836	93,41	Sangat Tinggi
	24	Sosialisasi BSM / PIP SD	200.000.000	40.000.000	31.902.500	79,76	Tinggi
	25	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana SD dan SMP (DAK)	500.000.000	125.000.000	111.340.000	89,07	Tinggi
	26	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa SD / MI	750.000.000	150.000.000	125.665.500	83,78	Tinggi
	27	Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, Pembangunan Ruang Guru dan Penambahan Ruang Kelas	89.800.000.000	18.135.000.000	17.950.087.100	98,98	Sangat Tinggi
	28	Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab SD Negeri	3.400.000.000	680.000.000	670.722.750	98,64	Sangat Tinggi
	29	Pengadaan Laboratorium Bahasa	3.550.000.000	710.000.000	657.171.114	92,56	Sangat Tinggi
	30	Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Kabupaten Tegal	100.000.000	20.000.000	12.080.400	60,40	Rendah
	31	Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SD Kabupaten Tegal	250.000.000	50.000.000	48.051.000	96,10	Sangat Tinggi
	32	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	100.000.000	20.000.000	19.955.000	99,78	Sangat Tinggi
	33	Fasilitasi Sarana Implementasi Kurikulum 2013 SMP	1.000.000.000	200.000.000	196.707.910	98,35	Sangat Tinggi
	34	Pembuatan Media Pembelajaran SMP	100.000.000	20.000.000	17.980.550	89,90	Tinggi
	35	Fasilitasi PPDB Online SMP	450.000.000	90.000.000	13.713.500	15,24	Sangat Rendah
	36	Lomba Sekolah Sehat SMP	100.000.000	20.000.000	19.758.500	98,79	Sangat Tinggi
	37	Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP	2.500.000.000	500.000.000	478.470.000	95,69	Sangat Tinggi
	38	Penataan Lingkungan dan Pembangunan Mushola SD Negeri	1.500.000.000	300.000.000	296.742.400	98,91	Sangat Tinggi
	39	Rehab Sekolah Dasar Negeri	5.500.000.000	1.100.000.000	1.078.660.629	98,06	Sangat Tinggi
	40	Pavingisasi/Penataan Lingkungan Sekolah Dasar Negeri	3.250.000.000	650.000.000	644.858.000	99,21	Sangat Tinggi
	41	Pavingisasi/Penataan Lingkungan SMP Negeri 03 Margasari Kecamatan Margasari	1.000.000.000	200.000.000	196.630.250	98,32	Sangat Tinggi
	42	Pembangunan RKB Sekolah Dasar Negeri	4.450.000.000	890.000.000	874.809.000	98,29	Sangat Tinggi
	43	Pengadaan Drumband Sekolah Dasar Negeri	500.000.000	150.000.000	147.219.000	98,15	Sangat Tinggi
	44	Penataan Lingkungan SMP Negeri 01 Warurejo	750.000.000	150.000.000	147.574.000	98,38	Sangat Tinggi
	45	Pembangunan Pagar SDN Dukuhjati Wetan 01	500.000.000	100.000.000	98.535.750	98,54	Sangat Tinggi
	46	Pagar Keliling dan Penataan Lingkungan SDN 02 Slarang Kidul	500.000.000	100.000.000	98.069.750	98,07	Sangat Tinggi

	47	Ruang Perpustakaan SDN 04 Kertayasa Desa Kertayasa Kec. Kramat	1.000.000.000	200.000.000	198.736.650	99,37	Sangat Tinggi
	48	Meubelair Rumah Pintar Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi	250.000.000	50.000.000	48.308.000	96,62	Sangat Tinggi
	49	Pembangunan Toilet, Dapur dan Tempat Parkir SDN Lemahduwur 01 Kec. Lemahduwur	500.000.000	100.000.000	98.632.750	98,63	Sangat Tinggi
	50	Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 Talang Kecamatan Talang	1.000.000.000	200.000.000	197.942.800	98,97	Sangat Tinggi
	51	Rehab Ruang Kelas untuk pembangunan/pembuatan Aula SMP Negeri 2 Balapulang Kecamatan Balapulang	1.000.000.000	200.000.000	197.438.250	98,72	Sangat Tinggi
	52	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah SMP (DAK)	5.840.000.000	1.168.000.000	1.095.332.480	93,78	Sangat Tinggi
	53	Pembayaran kegiatan rehabilitasi/ pembangunan SD		197.328.000	197.328.000	100,00	Sangat Tinggi
	54	Pembayaran kegiatan penataan lingkungan SD Balapulang Kulon		135.121.000	135.121.000	100,00	Sangat Tinggi
	55	Pembayaran kegiatan pembangunan ruang kelas baru SMP		162.840.000	162.840.000	100,00	Sangat Tinggi
	56	Pengadaan peralatan computer SMP N.1 Adiwerna		150.000.000	146.790.000	97,86	Sangat Tinggi
	7	Program Pendidikan Non Formal	12.600.000.000	2.520.000.000	2.442.108.050	96,91	Sangat Tinggi
	1	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	2.500.000.000	500.000.000	497.823.000	99,56	Sangat Tinggi
	2	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	1.500.000.000	300.000.000	293.257.000	97,75	Sangat Tinggi
	3	Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	750.000.000	150.000.000	149.274.500	99,52	Sangat Tinggi
	4	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket B	400.000.000	80.000.000	67.397.000	84,25	Tinggi
	5	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C	500.000.000	100.000.000	89.530.000	89,53	Tinggi
	6	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A	100.000.000	20.000.000	19.247.000	96,24	Sangat Tinggi
	7	Peningkatan Pendidikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	1.150.000.000	230.000.000	230.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	8	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Propinsi)	300.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	9	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Propinsi)	1.650.000.000	330.000.000	330.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	10	Penyelenggaraan Pendidikan Paket C	2.825.000.000	565.000.000	556.647.000	98,52	Sangat Tinggi

		(Bantuan Propinsi)					
	11	Peningkatan Sarana Prasarana Sanggar Kegiatan Bersama (SKB)	675.000.000	135.000.000	131.852.300	97,67	Sangat Tinggi
	12	Fasilitasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal	250.000.000	50.000.000	17.080.250	34,16	Sangat Rendah
	8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.110.500.000	4.239.100.000	4.003.109.288	94,43	Sangat Tinggi
	1	Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP	2.250.000.000	450.000.000	424.777.688	94,40	Sangat Tinggi
	2	Kegiatan Sertifikasi Guru	170.500.000	34.100.000	32.174.250	94,35	Sangat Tinggi
	3	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	500.000.000	100.000.000	53.981.000	53,98	Rendah
	4	Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	100.000.000	20.000.000	17.500.000	87,50	Tinggi
	5	Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Pendidik, Tenaga Kependidikan	875.000.000	175.000.000	143.065.500	81,75	Tinggi
	6	Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan	100.000.000	20.000.000	17.009.500	85,05	Tinggi
	7	Jambore PNFI	500.000.000	100.000.000	73.600.000	73,60	Sedang
	8	OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP	75.000.000	15.000.000	11.580.000	77,20	Tinggi
	9	Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri	14.480.000.000	2.896.000.000	2.880.000.000	99,45	Sangat Tinggi
	10	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	250.000.000	50.000.000	49.545.000	99,09	Sangat Tinggi
	11	Diklat Fungsional Pengawas Sekolah	625.000.000	125.000.000	121.270.850	97,02	Sangat Tinggi
	12	Rapat Koordinasi Dengan Satuan Pendidikan dan UPTD	100.000.000	20.000.000	16.832.500	84,16	Tinggi
	13	Penanganan Kasus Guru (TK, SD, SMP)	100.000.000	20.000.000	9.175.000	45,88	Sangat Rendah
	14	Penilaian Kinerja Guru Penilik	85.000.000	17.000.000	15.620.000	91,88	Sangat Tinggi
	15	Pemilihan Guru Berprestasi	750.000.000	150.000.000	94.022.000	62,68	Rendah
	16	Pelatihan Instruktur Kursus	150.000.000	30.000.000	25.982.000	86,61	Tinggi
	17	Pembayaran keputusan gugatan perdata		17.000.000	16.974.000	99,85	Sangat Tinggi
	9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.694.695.000	1.626.497.000	1.094.834.312	67,31	Sedang
	1	Manajemen dan Monitoring BOS	1.000.000.000	200.000.000	186.959.096	93,48	Sangat Tinggi
	2	Pendataan Aset Dinas Dikpora	375.000.000	75.000.000	74.850.000	99,80	Sangat Tinggi
	3	Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan	400.000.000	80.000.000	67.768.000	84,71	Tinggi
	4	Penunjang Pendataan Pendidikan	500.000.000	100.000.000	82.514.500	82,51	Tinggi
	5	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	2.794.695.000	299.331.000	125.239.953	41,84	Sangat Rendah
	6	Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal	500.000.000	100.000.000	52.429.000	52,43	Rendah

		7	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, MA	1.250.000.000	250.000.000	107.479.150	42,99	Sangat Rendah
		8	Pengadaan Perangkat Backbone Dapodik	1.900.000.000	380.000.000	268.226.113	70,59	Sedang
		9	Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik	975.000.000	142.166.000	129.368.500	91,00	Tinggi

Pada Tahun 2017, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal melaksanakan 15 Program dan 241 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 54.512.455.000,- (Lima puluh empat milyar limaratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Realisasi keuangan terhadap anggaran yang tersedia sebesar 90,77% atau sebesar Rp.49.480.955.403,- sedangkan realisasi fisik sebesar 92,97%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal lebih menitikberatkan pada upaya pencapaian indikator-indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014– 2019.

2.2.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Rata-Rata Lama Belajar (RLB).

Indikator ini mengandung definisi Rata-Rata Lama Sekolah/Belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Indikator ini merupakan salah satu dari Indikator Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, dan sangat terkait dengan Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mengelola pendidikan persekolahan sehingga dapat meningkatkan kinerja tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sedangkan Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang dimaksud adalah untuk mengatur pendidikan agar menjadi semakin baik. Selain itu, manajemen dapat diarahkan pada pendidikan yang efisien dipandang dari segi internal pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengukur indikator Penguatan Tata

Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik ini digunakan efisiensi pendidikan agar sasaran di bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna dalam arti dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu tenaga dan sebagainya.

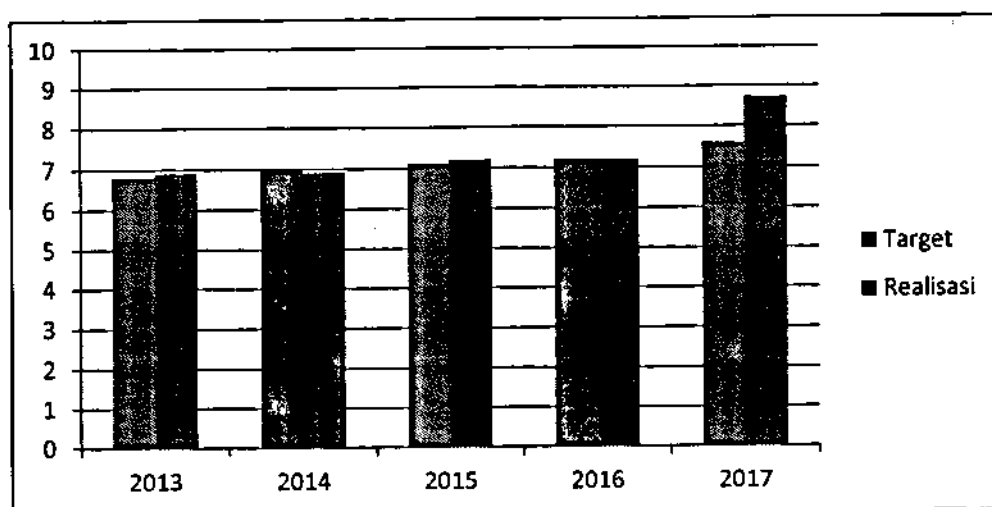
Berdasarkan data yang dimiliki, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal diakhir Tahun 2017 mempunyai nilai yang sama dengan Tahun 2016 . Hal ini dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1 Rata-rata Lama Sekolah

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Rata-rata Lama Sekolah	6.90	6.92	7.20	7.20	7,20

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

Gambar I Grafik Target dan capaian rata-rata lama sekolah



Tahun 2016 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal sebesar 7,20 atau setara dengan tingkat / kelas VII pada jenjang SMP (7 Tahun 2 Bulan). Pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal Tahun 2015 memenuhi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2015 yaitu sebesar 7,10. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal

sebesar 7,20 di Tahun 2017 telah memenuhi target tahunan sebesar 7.20 di Tahun 2017, tetapi angka tersebut belum memenuhi target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017 yang sebesar 9,00.

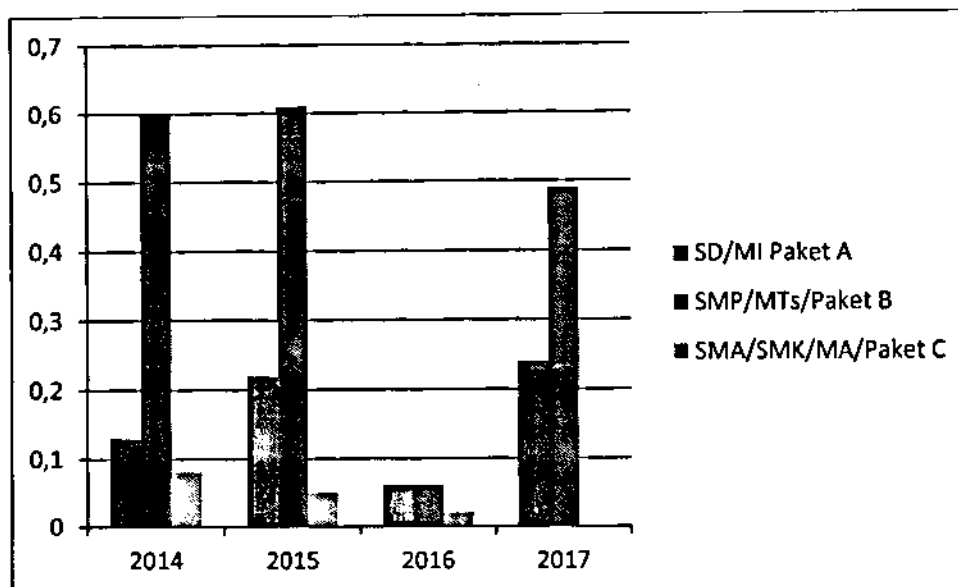
Dengan kondisi seperti ini, maka perlu dilakukan upaya yang konsisten dan terus menerus agar angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tegal dapat naik secara signifikan. Upaya yang terus dilakukan adalah dengan terus menekan angka mengulang dan angka putus sekolah serta menaikkan angka melanjutkan sekolah. Pada tahun 2016, tercatat di Kabupaten Tegal Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 0,06%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 0.06% dan pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 0.02. Pada jenjang SD, SMP dan setingkat SMA Angka putus sekolah ditahun 2017 menunjukkan penurunan bila di bandingkan dengan kondisi angka putus sekolah di Tahun 2015, Hal ini terutama terjadi di wilayah industri dan daerah pantai dikarenakan pada wilayah tersebut anak usia sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, membantu orang tua mencari nafkah. Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus mendorong anak-anak usia sekolah untuk terus berada dan belajar pada lembaga/satuan pendidikan formal. Untuk itu, pemerintah akan terus melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah agar anak-anak bangsa yang berusia sekolah dan berada di Kabupaten Tegal terjamin untuk mendapatkan pendidikan pada lembaga / satuan pendidikan formal. Angka putus sekolah bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Angka Putus sekolah

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	SD/MI Paket A	0.13	0.22	0.06	0.24
2	SMP/MTs/Paket B	0.60	0.61	0.06	0.49
3	SMA/SMK/MA/Paket C	0.08	0.05	0.02	-

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

Gambar 2 Grafik Angka Putus Sekolah



2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Indikator berikutnya adalah *APM*, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. *APM* digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Sedangkan *APK* didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. *APK* digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah.

APM dan APK merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu strategi dalam pembangunan pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis.

Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen dan elemen masyarakat. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua masyarakat melalui pendidikan.

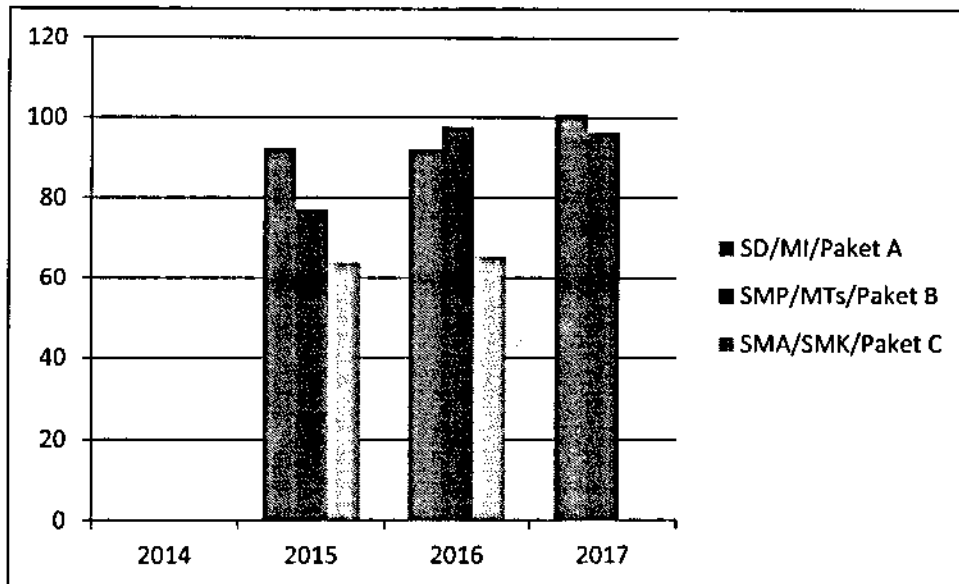
Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal telah dan akan terus melakukan berbagai upaya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Perkembangan APK dan APM jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/Paket C di Kabupaten Tegal, tergambar seperti pada Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3 Perkembangan APM dan APK

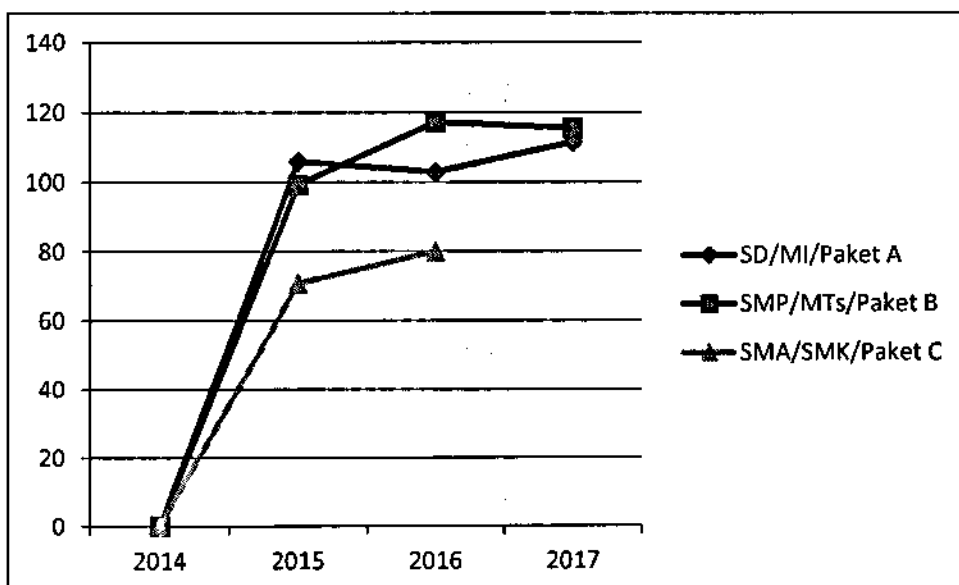
NO	URAIAN	TARGET KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Murni								
	SD/MI/Paket A	99.50	99.98	94.00	110	99,07	92.36	92.22	101.01
	SMP/MTs/Paket B	60,68	91.20	90.74	99	90,42	77.16	97.80	96.23
	SMA/SMK/Paket C	54,2	55.00	56.04		63,75	63.75	65.55	
2	Angka Partisipasi Kasar								
	SD/MI/Paket A	109,90	110	105	110	106,56	105.9	102.77	111.52
	SMP/MTs/Paket B	100	100.9	96.28	100	98,65	99.28	117.28	115.51
	SMA/SMK/Paket C	61,82	63.13	61.85		67,98	70.77	80.01	

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

Gambar 3 Grafik Capaian APM Dinas Dikbud Kabupaten Tegal



Gambar 4 Grafik Capaian APK Dinas Dikbud Kabupaten Tegal



Pencapaian APM SD/MI/Paket A Tahun 2017 Belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni angka capaian 101% dari target sebesar 110%. Pencapaian APM SMP/Mts/Paket B Tahun 2017 memenuhi atau mencapai target, yaitu 115 % dari target 100%. Selanjutnya, pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, APM jenjang ini juga mengalami perubahan / fluktuasi, yaitu 55.00% target pada tahun 2016 dan 65,55% pada capaian tahun 2016.

Pada periode yang sama, APK SD/MI/Paket A juga mengalami fluktuasi dari target 110% dengan capaian 111,52%. Terkait dengan pencapaian realisasi di Tahun 2017, pada jenjang SMP/MTs/Paket B memenuhi target yang telah ditentukan, yakni 100.09 % dari target 2017 dan capaian 2016 sebesar 117.28% .

Perubahan/fluktuasi juga terjadi pada pencapaian APK jenjang SMA/MA/SMK/Paket C. Pada Tahun 2016, APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 61.85% target 2016 dan capaian 2016 capaian APK SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 80.01%.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Tegal juga telah memperhatikan gender. Artinya, pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal tidak membedakan jenis kelamin. Seluruh anak bangsa yang berada di Kabupaten Tegal berhak untuk mendapatkan pendidikan dan belajar di satuan pendidikan formal dimana tingkat partisipasi penduduk usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan tampak berimbang.

2.2.3. Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekurang-kurangnya S1/DIV.

Indikator ini biasanya disebut dengan Persentase Guru Menurut Ijazah Tertinggi, dan masuk jenis indikator Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan. Sejalan dengan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu untuk semua jenjang pendidikan melalui persekolahan dan nonformal dan informal juga dilaksanakan. Mutu atau kualitas adalah sesuatu yang dianggap baik karena memenuhi suatu standar tertentu. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan menuju sesuatu yang baik atau standar tertentu. Peningkatan mutu dapat dilaksanakan pada masukan dan keluaran, proses, guru, sarana/prasarana dan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.

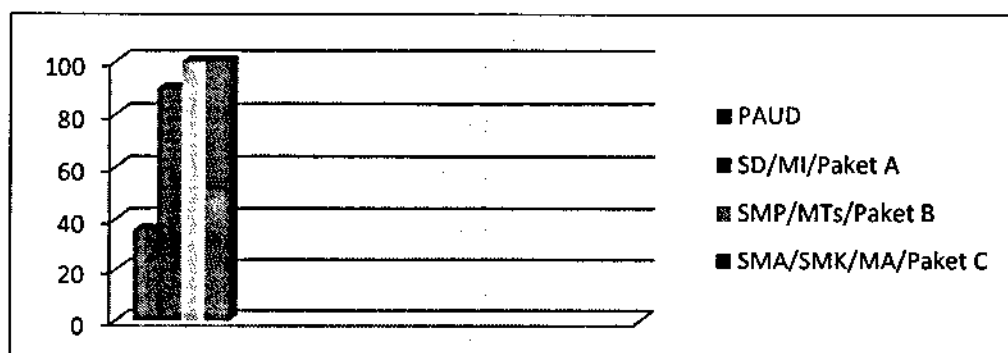
Mutu dapat ditingkatkan apabila proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif sehingga peserta didik dapat mengalami proses belajar mengajar yang berarti dan ditunjang oleh sumber daya seperti guru, sarana/prasarana, dan biaya yang memadai. Proses belajar yang bermutu akan

menghasilkan lulusan yang mampu belajar terus menerus sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

Relevansi pendidikan di tingkat sekolah menengah (SM) diarahkan untuk melihat kesesuaian antara pendidikan di sekolah dengan lapangan usaha setelah mereka lulus sehingga mereka mampu menjadi tenaga pekerja terampil tingkat menengah.

Indikator persentase guru menurut ijazah tertinggi didefinisikan sebagai perbandingan antara guru dengan ijazah tertentu yang dimiliki pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Namun, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal, indikator ini lebih melihat seberapa besar jumlah Guru (**Tenaga Pendidik**) yang telah memiliki kualifikasi Sarjana atau Diploma IV. Dengan jumlah seluruh Tenaga Pendidik (tidak termasuk **Tenaga Kependidikan**) dari jenjang TK/PAUD Guru PNS sejumlah 104 Orang berklasifikasi S1/DIV sejumlah 78 orang atau 75 %. Jenjang SD Guru PNS sebanyak 8.782 Orang ,6.282 orang diantaranya berkualifikasi S1/DIV atau 71,53 %. Jenjang SMP terdapat pendidik /Guru PNS sebanyak 2.367 dan 2.146 berkulifikasi S1/D IV atau 90.66%. Jenjang SMA/SMK jumlah guru PNS sebanyak 764. 736 berkulifikasi S1/DIV atau berkisar 96.33%.

Gambar 5 Grafik Keberadaan Guru menurut status kepegawaian, jenjang pendidikan Tahun 2017



Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mentargetkan 64.5 % atau

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2017 menargetkan 64.5 % atau 7.691 Tenaga Pendidik sudah berkualifikasi Diploma IV / S1. Kondisi riil di tahun 2017 sebanyak 10.016 orang Tenaga Pendidik telah memiliki kualifikasi Sarjana / Diploma IV. Sehingga target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal telah tercapai, dengan capaian sebesar 129,68%.

Adapun sebaran jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan jenjang pendidikannya dimana pendidik dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana / Diploma IV terbesar berada pada jenjang Sekolah Dasar. Berikutnya adalah SMP, SMA/MA dan paling sedikit berada pada jenjang PAUDNI.

Menjadi tugas Pemerintah untuk terus mendorong dan memberikan kesempatan pada seluruh Tenaga Pendidik untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya, minimal setara Sarjana / Diploma IV

Secara keseluruhan, terdapat 2.749 Tenaga Pendidik lagi yang belum memperoleh Sarjana / Diploma IV. Namun, dari jumlah tersebut, 110 orang Tenaga Pendidik saat ini sedang mengikuti perkuliahan untuk mendapatkan Sarjana / Diploma IV.

Berbicara Tenaga Pendidik maka akan berbicara tentang kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi berkenaan dengan latar belakang pendidikan si Tenaga Pendidik. Sedangkan berbicara kompetensi maka akan berkaitan sangat erat dengan profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 maka profesionalisme Tenaga Pendidik ditandai dengan diberikannya sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru / tenaga pendidik sebagai tenaga profesional.

Dengan peningkatan status guru / tenaga pendidik sebagai tenaga profesional maka kompetensi merupakan langkah penting yang perlu ditingkatkan. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat

kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi guru-guru untuk dapat mengembangkan kompetensi. Tetapi tidak mustahil menjadi hambatan bagi guru-guru yang memiliki kompetensi rendah.

2.2.4. Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar / Sederajat (%) dalam Kategori Baik.

Indikator ini merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Indikator ini didefinisikan sebagai rasio jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar sederajat dalam kategori baik pada setiap 100 orang murid / siswa dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak tersedianya satuan pendidikan SD sederajat pada setiap 100 orang murid / siswa. Begitu juga halnya dengan indikator *Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat (%) dalam Kategori Baik* dan *Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat (%) dalam Kategori Baik*, juga memiliki definisi yang sama namun berbeda satuan pendidikan. seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Kondisi Gedung Sekolah

No	Jenjang	Jumlah Gedung Sekolah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	TK/PAUD	282	282	0
2	SD	700	749	0
3	SMP	107	98	0
4	SMA/SMK	89	89	0

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

Kondisi Ruang Kelas

No	Jenjang	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
1	SD	4.686	631	3.137	407	306	205
2	SMP	1.435	273	1.080	26	30	26

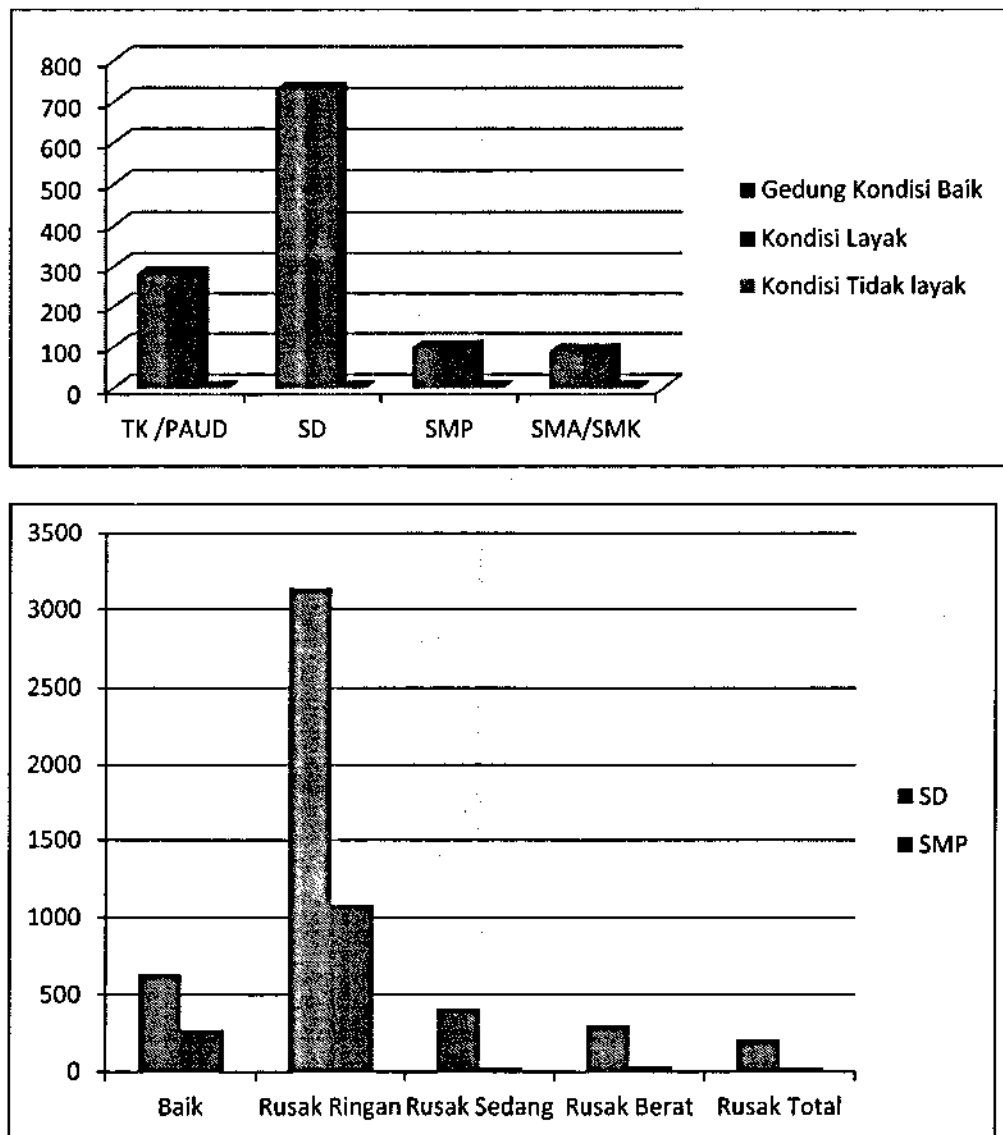
Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa Rasio Ketersediaan SD / Sederajat Dalam Kategori Baik telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017. Jumlah Gedung TK/PAUD sebanyak 282 Sekolah dengan kategori baik/layak sebanyak 282 dengan jumlah penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD) sebanyak 72.381 maka ratio ketersediaan pelayanan PAUD dibanding dengan jumlah penduduk usia sebesar 1 : 256 .

Jumlah Gedung SD sederajat sebanyak 701 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) sebanyak 154.827 orang maka Rasio Ketersediaan SD / Sederajat dalam kategori baik sebesar 1 : 206.

Adapun Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat dalam kategori baik memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017. Dengan jumlah SMP sederajat sebanyak 98 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia SMP (13-15 tahun) sebanyak 31.288 orang maka Rasio Ketersediaan SMP / Sederajat 1: 319.

Pada jenjang SMA/SMK sederajat, Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat Dalam Kategori Baik juga memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2016. Dengan jumlah SMA/SMK sederajat sebanyak 89 sekolah dan seluruhnya memiliki kategori baik serta jumlah penduduk usia SMA /SMK (16-18 tahun) sebanyak 31.454 orang maka Rasio Ketersediaan SMA / Sederajat Dalam Kategori Baik sebesar 1:353

Gambar 6 Grafik Kondisi Gedung Sekolah



Berdasarkan fakta yang terlihat seperti diatas, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Hal ini dilakukan dengan menambah Ruang Kelas Baru (RKB) pada sekolah-sekolah yang sudah ada dan Rehab bangunan ruang kelas yang dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Hal ini mengingat, apabila mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) maka akan dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu dan tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar.

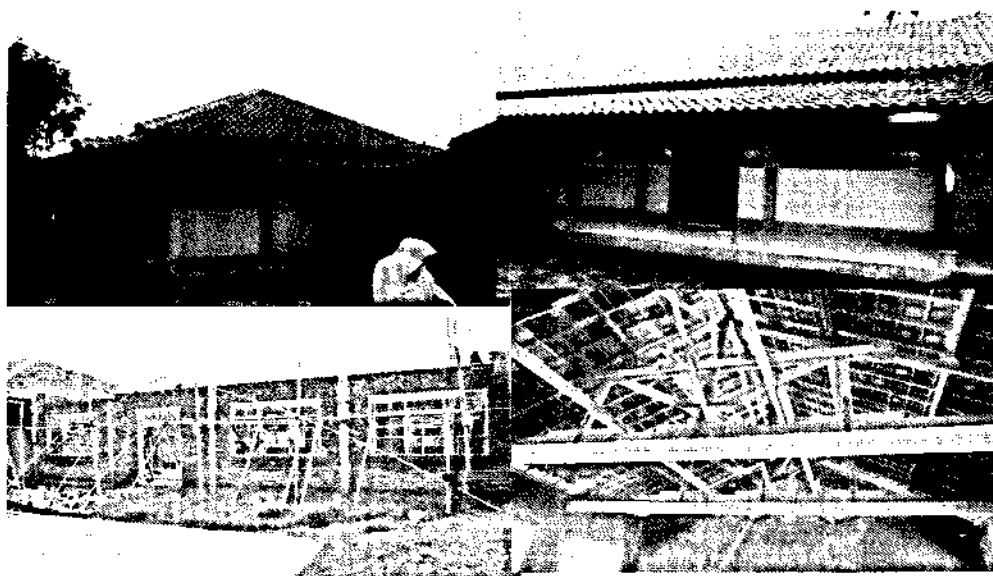
Terkait dengan pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal tidak hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal, tetapi

juga yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Bankeu Prov) dan APBN dalam bentuk Blockgrant.

Pada Gambar 7 (Sarana dan prasarana pendidikan yang dibangun melalui APBN) tampak beberapa sarana dan prasarana pendidikan, baik pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan Perpustakaan maupun Rehabilitasi Ruang Kelas yang pembiayaannya melalui APBN dengan pola blockgrant dan dilaksanakan dengan metode swakelola oleh Komite Sekolah.

Gambar 7

Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Dibangun Melalui APBN di Kabupaten Tegal Tahun 2016



2.2.5. Angka Melek Huruf (AMH).

Indikator lain yang dapat menggambarkan perkembangan pendidikan di Kabupaten Tegal adalah Angka Melek Huruf yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang melek huruf dengan penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilai angka melek huruf berarti semakin baik kualitas penduduk di suatu daerah. Angka Melek Huruf juga bisa diartikan sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis.

Kemampuan membaca dan menulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, supaya memiliki peluang

untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegunaan Angka Melek Huruf adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang bisa membaca dan menulis di suatu daerah sehingga dapat diketahui berapa besar jumlah penduduk yang masih buta huruf, sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan.

Angka Melek Huruf juga digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia, yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan Kabupaten dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

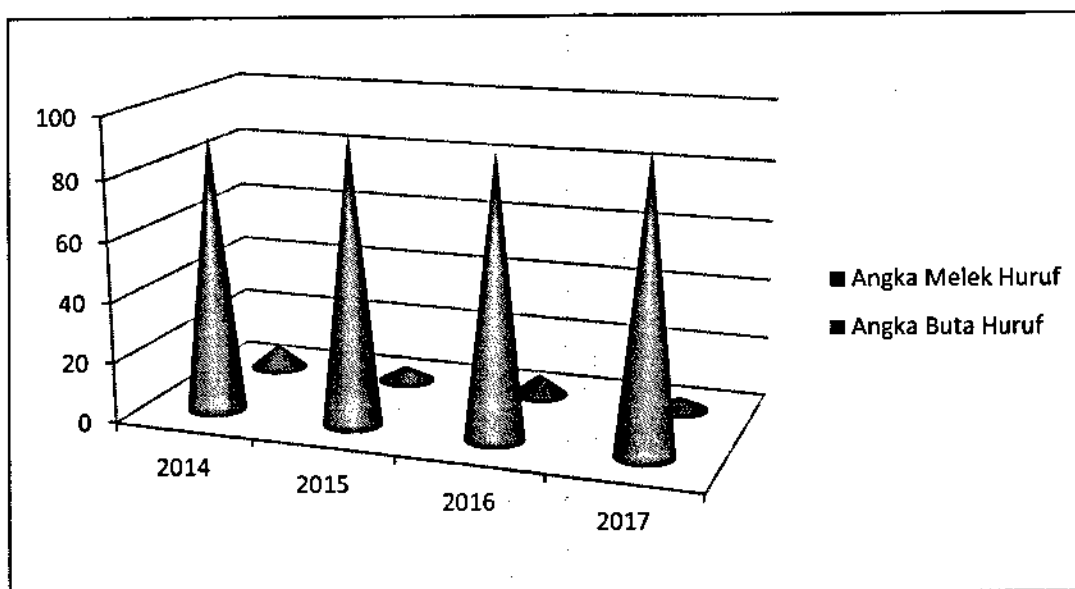
Sama halnya dengan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf juga merupakan indikator nonpendidikan yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan. Oleh karena itu Angka Melek Huruf tidak dapat dipisahkan dari data pendidikan yang ada, melainkan sebagai pelengkap atau penunjang data pendidikan yang ada. Dari Tabel 2.16. berikut ini, tampak bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel 2.5 Angka Melek Huruf

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf Usia >45 Tahun	91.80	94.80	93.00	95.67

(Sumber Data : Seksi Pendataan dan Informasi Bidang Bina Program Dinas Dikbud Kab Tegal)

Gambar 8. Grafik Capaian Angka melek huruf Usia >45 Tahun



Pada tahun 2012 AMH Kabupaten Tegal sebesar 88,08% meningkat di Tahun 2013 sebesar 89,01%, meningkat lagi di tahun 2014 sebesar 91,80% hingga pada tahun 2015 meningkat menjadi 94,80%. Di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 93,00% sehingga terjadi kenaikan warga buta aksara sebesar 1,80% dibanding tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tegal mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, jumlah penduduk di Kabupaten Tegal yang masih mengalami buta huruf sebanyak 4,33,00% di akhir tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus berupaya dan bekerja keras agar seluruh penduduk yang masih buta huruf dapat dituntaskan. Berbagai program pembangunan telah dan akan terus dilakukan, diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Program-program ini diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Inklusif dan lain sebagainya. Tidak hanya menyelenggarakan melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal, Pemerintah akan turun ke lapangan dan mendekati dengan kantong-kantong penduduk yang teridentifikasi masih terdapat

buta uruf. Tak terkecuali, pemerintah Kabupaten Tegal juga menyelenggarakan Penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tegal Andong Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bukti akan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidik

Indikator Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah merupakan dua indikator pendidikan yang memiliki kontribusi pada penghitungan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)***. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sabagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan indeks standar hidup layak. ‘

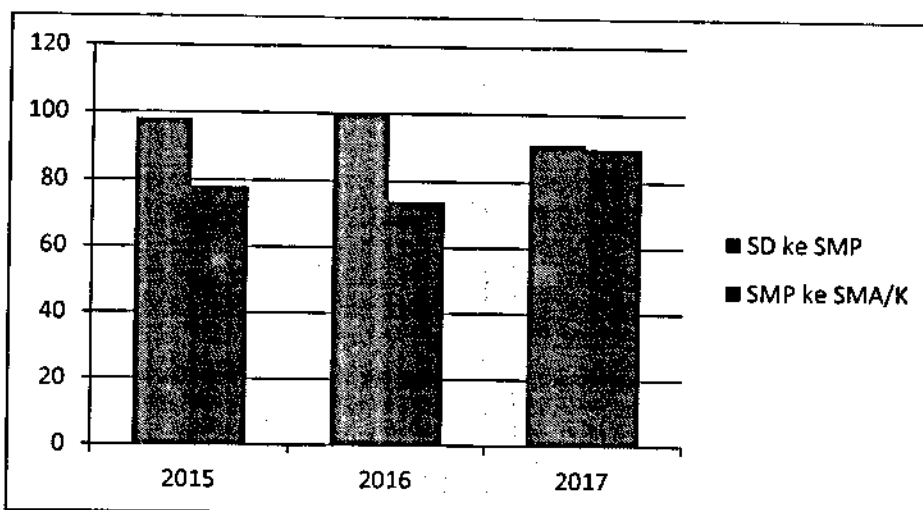
2.2.6. Angka Melanjutkan (AM) Pendidikan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi.

Indikator lain adalah Angka Melanjutkan (AM) Pendidikan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi. Dari Gambar 9 angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, memperlihatkan angka melanjutkan yang mengalami fluktuasi.

Untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dasar (SD) mengalami peningkatan menjadi angka 99.79 % ditahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat 98.07%. Sedangkan untuk angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berada di angka 74% ditahun 2017 , lebih rendah dari Tahun 2016 sebesar 78.16 %. Usaha peningkatan angka melanjutkan ini ditunjang dengan penyediaan ruang-ruang kelas baru yang menjamin ketersediaan ruang kelas sebagai tempat belajar dan semakin tingginya perhatian pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan penduduknya melalui bantuan dalam bentuk subsidi maupun beasiswa khususnya bagi penduduk tidak mampu. Apalagi saat ini pemerintah tidak hanya memberikan program BOS pada

jenjang SD sederajat dan SMP sederajat tetapi juga sudah mencapai jenjang SMA sederajat.

Gambar 9 Grafik Angka Melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA.



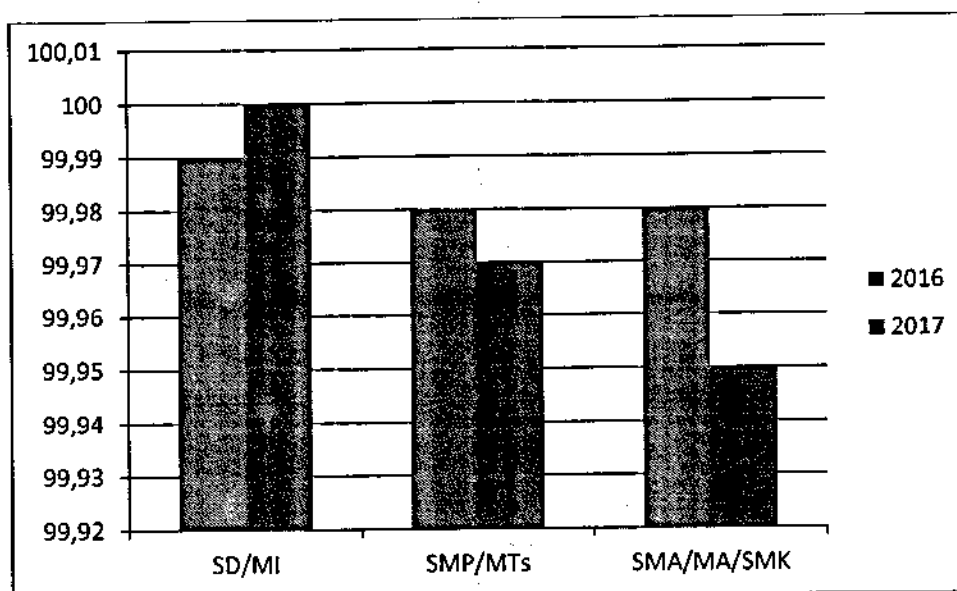
2.2.7. Angka Lulusan (AL).

Indikator terakhir pada bidang pendidikan adalah Angka Lulusan yang merupakan bagian indikator mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Angka Lulusan didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya atau mencapai angka ideal 100% maka semua siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya. Angka lulusan ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah. Selain sebagai indikator Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, angka lulusan juga merupakan indikator *MDGs* (*Millenium Development Goals*).

Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan angka lulusan hingga mencapai angka ideal yaitu 100%. Upaya itu antara lain dengan menyelenggarakan try out ujian nasional sebagai persiapan anak-anak kelas tertinggi di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menghadapi ujian nasional. Selain itu juga dilaksanakan pemantapan psikologis agar secara mental siap mengikuti ujian nasional. Angka lulusan tingkat SD/MI di tahun 2017 mencapai

angka lulusan sebesar 100 %, Tingkat SMP/MTs berada di angka 99,98 % dan untuk tingkat sekolah SMA/SMK/MA berada di angka 99,98 % di Tahun 2017.

Gambar 10. Grafik Angka Lulusan Jenjang SD SMP dan SM



2.2.8 Persentase Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Sesuai SPM

NO	URAIAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2016	2017	2016	2017
1	Ruang Kelas SD/MI Sesuai SPM	70	90	79	80
2	Ruang Kelas SMP/MTs	60	73	72	80
3	Ruang Kelas SMA/SMK/MA	84.84	85.65	100	100

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Pendidikan Dasar sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan program, dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan jumlah sekolah SD/MI sejumlah 701 Sekolah dari target 90 % ditahun 2017 capaian kinerja realisasi tahun 2017 sejumlah 80 % atau 600 Sekolah dalam kondisi sesuai dengan standart SPM, 10 % atau 149 sekolah SD/MI belum sesuai dengan SPM.

Target Ruang Kelas SMP/MTs sesuai dengan standar SPM di Tahun 2017 sebesar 73%, Realisasi di tahun 2017 sebesar 80 % atau sekitar 78 sekolah dari 98 jumlah keseluruhan sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tegal.

Ruang kelas SMA/SMK/MA menduduki tingkat tertinggi dari standar SPM yang ada yaitu 100% atau sekitar 89 sekolah dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Tegal di Tahun 2016 telah memenuhi standart SPM.

2.2.9 Persentase SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK/MA Memiliki Sanitasi yang layak

NO	URAIAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2016	2017	2016	2017
1	Prosentase SD/MI Memiliki sanitasi layak	35.4	41	25.95	40
2	Prosentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	10	14	12	13
3	Prosentase SMA/SMK/MA memiliki sanitasi layak	12	15	20	22

Sesuai dengan indikator stardar pelayanan minimal, tentang kondisi sekolah yang memiliki sanitasi yang layak di tahun 2017 Prosentasi SD/MI yang memiliki sanitasi layak sejumlah 40 % atau sekitar 299 Sekolah Selebihnya sekita 450 Sekolah belum memiliki sanitasi yang layak.

Tingkat SMP/MTs di tahun 2017 hanya sekitar 13% atau 13 sekolah yang memiliki sanitasi layak. Selebihnya sekitar 85 sekolah belum memiliki sanitasi layak.

Tingkat SMA/SMK/MA hanya 22 % atau sekitar 20 Sekolah yang memiliki sanitasi layak sesuai dengan SPM atau rasio keberadaan siswa dengan keberadaan dengan ruang sanitasi. Selebihnya sekitar 69 sekolah SMA/SMK/MA sekolah belum memiliki sanitasi yang layak

Tingkat kelayakan sanitasi yang ada di ukur berdasarkan rasio keberadaan siswa dengan tersedianya ruang sanitasi sekolah sekolah yang ada. Pada dasarnya setiap sekolah telah mempunyai ruang sanitasi, namun belum sesuai dengan kondisi SPM dan tingkat Rasio.

2.2.8. Capaian Bidang Kebudayaan

Adapun capaian bidang Kebudayaan bisa dilihat pada Jumlah data base seni budaya dinamis, infrastruktur seni yang dibangun/difasilitasi, jumlah pentas seni dan budaya yang diinisasi pemda, jumlah promosi seni dan budaya lokal di tingkat kabupaten/provinsi dan nasional, jumlah kerjasama di bidang kesenian, jumlah

kelompok seni dan jumlah destinasi wisata dengan menu pentas seni dan budaya, indikator tersebut sudah terpenuhi namun perlu adanya peningkatan di tahun-tahun yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyusunan visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal tidak dapat terlepas dari Visi Bupati sebagai janji yang akan dicapai dalam masa jabatannya. Visi dan misi Bupati Tegal masa jabatan 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera.”

“Cinta Desa,CintaRakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Untuk mencapai tujuan dari Visi Bupati/Wakil Bupati periode 2015 - 2019, maka dijabarkan dalam bentuk Arti visi sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| Mandiri | : Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing. |
| Unggul | : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehinggamenjadi masyarakat yang unggul |
| Berbudaya | : Masyarakat memilki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Religius | : Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Sejahtera | : Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. |

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.**
- 2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.**
- 3. Mewujudkan kehidupan *paceduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.**
- 4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.**
- 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .**

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai kerangka agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan sistem yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Kerangka pembangunan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sistem Inovasi Daerah adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu

tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

1. **Kerangka umum bagi inovasi,**

yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi. Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi di daerah.

2. **Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorpsi dunia usaha,**

yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara sementara atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara melekat dan menjalankan fungsi koordinasi. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.

3. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi,

yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang. Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Penelitian dan pengembangan yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya penelitian dan pengembangan tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada dan atau dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsiserta difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.

4. Budaya inovasi

yaitu membangun budaya inovasi Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.

5. Sistem inovasi dan klaster industri,

yaitu menumbuh kembangkan sistem inovasi dan menumbuh kembangkan klaster (industri) nasional dan daerah Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan.

Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.

6. Perkembangan dunia,

yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global. Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.

7. Afirmasi wilayah,

yaitu pengembangan wilayah tertinggal. Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generik sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.

8. Afirmasi pengungkit,

yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain *telecenter* dan pemerintahan berbasis elektronik.

Delapan agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD merupakan kerangka kebijakan. Dalam struktur (hierarki) perencanaan strategis (*strategic planning*), yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam kerangka pembangunan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, Sistem Inovasi Daerah melingkupi RPJMD ini secara keseluruhan sebagai pendekatan siklus pembangunan. Sebagai kerangka pembangunan yang melingkupi RPJMD, telah diidentifikasi 9 (Sembilan) kerangka pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka pembangunan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan kebijakan unggulan pemerintah daerah yaitu Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal. Kerangka pembangunan tersebut adalah:

Peningkatan kinerja pelayanan menjadi sangat penting mengingat bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan kebudayaan.
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal dan nonformal;

- c. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk serta arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi unit kerja di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
- f. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan
- g. Membina, mengawasi dan menilai kinerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional (membuat dan menandatangani Laporan Evaluasi Kinerja).
- h. Pembinaan dan pengurusan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Usaha Wajib Belajar;
- i. Pembinaan dan pengurusan pendidikan non formal dan informal, pembinaan generasi muda termasuk pembinaan kegiatan kebudayaana.
- j. Pemberian layanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- o. Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, menggerakkan, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan dalam bidang pelayanan teknis dan administratif Pendidikan dan Kebudayaan
 - c. Memberi petunjuk dan melakukan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Pengawas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Menyusun saran alternatif di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati;
 - f. Menyusun usul alokasi pembiayaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan teknologi informasi;
 - g. Memberikan layanan informasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan urusan wajib yang mendapat porsi otonomi daerah yang luas. Tuntutan atas layanan pendidikan yang prima, khususnya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal mengharuskan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh

Organisasi untuk siap dan mampu menjawab seluruh tuntutan masyarakat, yang semakin hari semakin tinggi permintaannya.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui konsep perencanaan partisipatif, yaitu suatu tahapan perencanaan yang dilakukan melalui : 1) proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan komunitas terkecil (lingkungan sekolah) secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan; 2) proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) yang dimulai dari penjajagan kebutuhan/permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan yang diharapkan; dan 3) proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama-sama (partisipatif) dan terbuka.

Perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal menganut azas perencanaan partisipatif, dipilih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dikarenakan perencanaan partisipatif memiliki manfaat, diantaranya : a) Bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka dan juga untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi); b) Dengan adanya *partisipasi masyarakat* dalam melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif akan mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Adapun metode pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan melalui perencanaan partisipatif yaitu melalui penerimaan usulan pada saat Anggota Legislatif (DPRD Kabupaten Tegal) melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya masing-masing saat masa reses DPRD. Selain itu, usulan program dan kegiatan juga diterima pada saat Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Tegal. Dengan fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal, usulan program dan kegiatan juga diterima, baik pada tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) maupun tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Usulan program dan kegiatan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal melalui forum-forum sebagaimana yang disebutkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah” **“Terwujudnya pelayanan prima Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Cerdas, Produktif, Berakhlak Mulia dan Berprestasi”**.

Dalam rangka mewujudkan dan menjabarkan visi tersebut diatas maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tegal mengembangkan **“Misi”** sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola, pencitraan publik, tata nilai penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan yang baik, serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan dasar yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Mewujudkan dukungan sustainabilitas (berkelanjutan) lulusan pendidikan dasar ke sekolah menengah dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan menengah yang variatif dan kreatif.
4. Mewujudkan peningkatan kompetensi teknis, sosial, personal, manajerial dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Mewujudkan kualitas/mutu pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.
6. Mewujudkan keberlanjutan even kebudayaan dan pemeliharaan cagar benda budaya.

Upaya-upaya pencapaian Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelaksanaan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Kabupaten . Visi dan misi Bupati Tegal masa jabatan 2014 - 2019 adalah sebagai berikut

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera. “Cinta Desa,Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Untuk mencapai tujuan dari VisiBupati/Wakil Bupati periode 2014 - 2019, maka dijabarkan dalam bentuk Arti visi sebagai berikut :

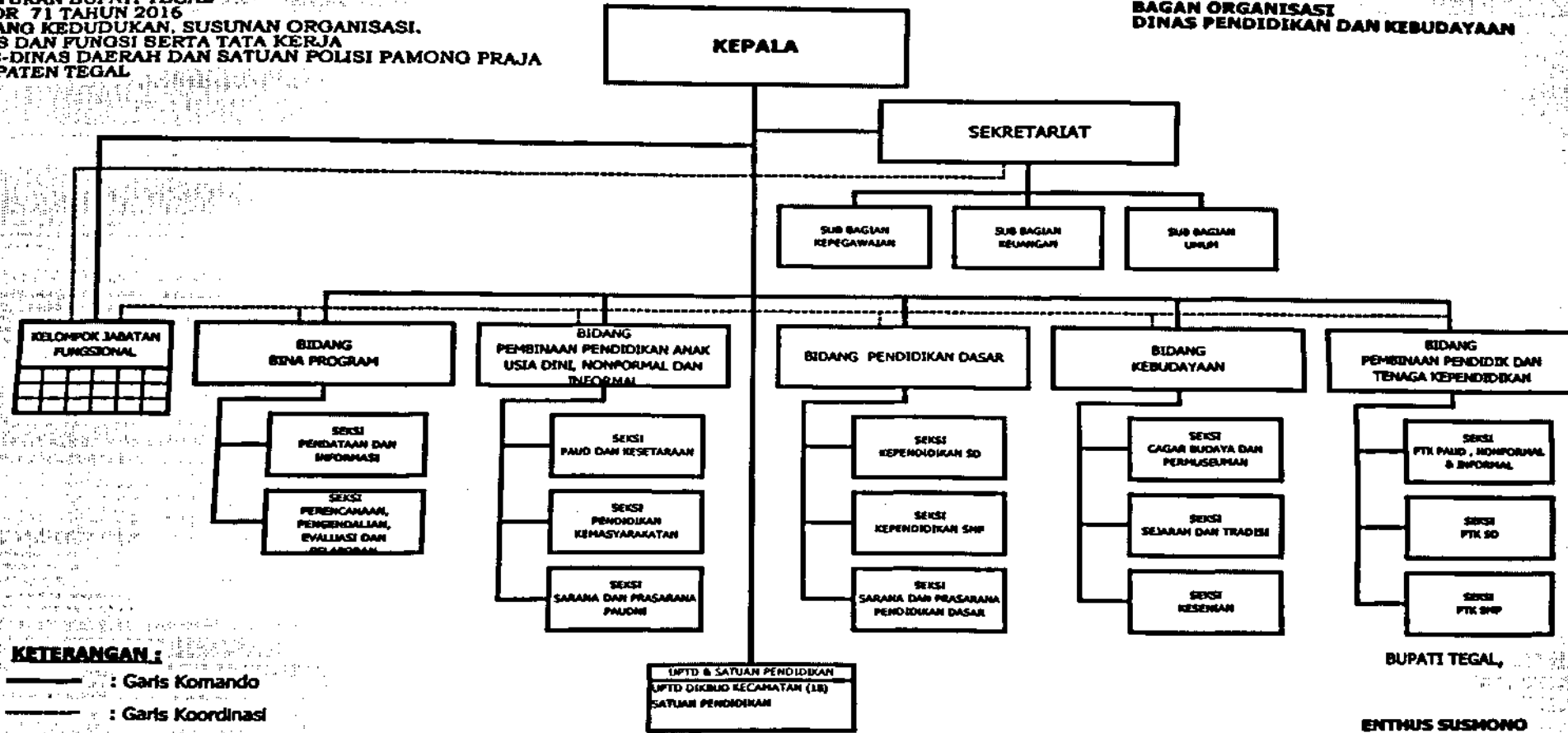
Mandiri	: Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing.
Unggul	: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehinggamenjadi masyarakat yang unggul
Berbudaya	: Masyarakat memilki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Religius	: Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa
Sejahtera	: Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.**
- 2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.**

**LAMPIRAN I.A
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI BERTA TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



KETERANGAN:
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
ENTHUS SUSMONO

Lampiran 2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Dikbud Kab Tegal.

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PENDIDIKAN DASAR												
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	190 ruang kelas SD rusak berat Rehabilitasi ruang kelas rusak berat	190 ruang	50 ruang	2,500,000,000	55 ruang	2,750,000,000	60 ruang	3,000,000,000	25 ruang	1,250,000,000	190 Ruang	237,500,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	750 ruang kelas SD rusak sedang, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang	750 ruang	100 ruang	3,500,000,000	150 ruang	5,250,000,000	250 ruang	8,750,000,000	130 ruang	4,550,000,000	120 ruang	4,200,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Jumlah rombel tidak sebanding jumlah ruang kelas, 138 ruang kelas baru SD	139 ruang	20 ruang	2,070,000,000	48 ruang	4,968,000,000	55 ruang	5,692,500,000	16 ruang	1,656,000,000	0	
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	218 sekolah mengusulkan Pembangunan ruang Perpustakaan, Pembangunan ruang perpustakaan	218 ruang	38 ruang	4,127,400,000	54 ruang	6,137,100,000	70 ruang	8,025,500,000	30 ruang	3,439,500,000	28 ruang	3,210,200,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	MCK/WC yang layak sangat diharapkan, 419 MCK/WC kurang/tidak layak, Pemeliharaan/rehab MCK/WC 419	419 ruang	25 ruang	250,000,000	50 ruang	500,000,000	75 ruang	750,000,000	50 ruang	500,000,000	50 ruang	500,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah belum ada/rusak berat ruang guru/KS sejumlah 136 sekolah, Pembangunan ruang Guru/KS 136 SD	Ruang KS/Gr 95 ruang	10 ruang	800,000,000	15 ruang	1,200,000,000	30 ruang	2,400,000,000	20 ruang	1,600,000,000	20 ruang	1,600,000,000

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Buku Kepustakaan di 479 sekolah SD belum memadai, Pengadaan Buku Kepustakaan untuk 479 sekolah SD	buku kepustakaan 275	50	1,852,000,000	50	1,852,000,000	75	2,778,000,000	50	1,852,000,000	50	1,852,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Peralatan Pendidikan di 479 sekolah SD belum memadai, Pengadaan Peralatan untuk 479 sekolah SD	300 peralatan pendidikan	50	2,768,500,000	50	2,768,500,000	75	4,152,750,000	50	2,768,500,000	50	2,768,500,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Keindahan dan keamanan siswa di lingkungan sekolah, Penataan lingkungan sekolah di 55 SD/SMP	45 perbaikan lingkungan	5	350,000,000	9	630,000,000	11	770,000,000	10	700,000,000	10	700,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Mebel sekolah mengalami keusakan/kurang sejumlah 480 unit/ruang SD/SMP	184 unit mebel	38	494,000,000	50	650,000,000	70	910,000,000	50	650,000,000	50	650,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	107 ruang kelas SMP rusak berat/sedang, rehab ruang kelas 107 ruang	107 ruang	20 ruang	1,600,000,000	25 ruang	2,000,000,000	30 ruang	2,400,000,000	17 ruang	1,360,000,000	0	
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	sekolah belum memiliki ruang Lab. Bahasa sejumlah 87 sekolah SMP negeri/swasta	27 ruang	4	784,000,000	5	980,000,000	6	1,176,000,000	5	980,000,000	5	980,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	sekolah belum memiliki ruang Lab. IPA sejumlah 56 sekolah SMP negeri/swasta	27 ruang	4	784,000,000	5	980,000,000	6	1,176,000,000	5	980,000,000	5	980,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Jumlah rombongan belajar tidak sebanding jumlah ruang kelas, 63 ruang kelas baru SMP	63 ruang	10	1,200,000,000	12	1,440,000,000	20	2,400,000,000	3	3,600,000,000		

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah belum ada/rusak berat ruang guru/KS sejumlah 47 sekolah, Pembangunan ruang Guru/KS 47 SD	30 ruang guru/ks SMP	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	8	1,600,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah masih kurang/belum ada Peralatan Lab. Bahasa 74 sekolah, pengadaan Alat Lab. Bahasa 74 unit	20 peralat Lab Bahasa	2	300,000,000	4	200,000,000	5	750,000,000	4	600,000,000	4	600,000,000
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Sekolah masih kurang/belum ada Peralatan Lab. IPA 49 sekolah, pengadaan Alat Lab. IPA 49 unit	24 pelatan Lab. IPA	2	100,000,000	5	250,000,000	7	350,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000
SEKSI KEPENDIDIKAN SMP												
Latihan Ujian Nasional SMP/ Try Out SMP/MTs.	Latihan Ujian Nasional SMP/MTs Kab Tegal 21.500 siswa, 20 paket untuk 4 mapel UN	Master soal 180 SMP/MTs	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000	21500 siswa	752,000,000
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMP/MTs.	Terlaksananya Ujian Nasional Siswa SMP/MTs Kab Tegal melaksanakan UN 21.500	Siswa 21.300 lulus UN 99,6 %	siswa 21.500 lulus UN 99,6%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 99,9%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 100%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 100%	385,000,000	siswa 21.500 lulus UN 100%	385,000,000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)	Belum berprestasi FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi tingkat Provinsi. Terlaksananya FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi tingkat kab dan pengiriman tingkat provinsi	1000 peserta	1200 peserta	200,000,000	1250 peserta	200,000,000	1250 peserta	200,000,000	1300 peserta	200,000,000	1300 peserta	200,000,000
Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI SMP Kab. Tegal	Mempertahankan prestasi Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI tingkat provinsi. Terlaksananya Kegiatan MAPSI SMP tingkat kab	250 siswa	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000	250 siswa	50,000,000

Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Tegal	Ditetapkannya Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam/ MAPSI SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Tegal. Terlaksananya Kegiatan MAPSI SMP Tk. Prvinsi Jateng di Kab. Tegal.	35 kab/kota	35 kab / kota	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Kurikulum 2015 Tingkat SMP	Terlaksana Pelatihan Kurikulum 2015		100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000	100 SMP N/S	50,000,000
Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nas Tingkat SMP	Hasil Nilai UN SMP kab Tegal peringkat 28/ prov Jateng . Terlaksananya bedah SKL Mapel Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia, IPA dan Matematika untuk menaikkan peringkat kelulusan	Rangking 28/ prov Jateng . Ter	rangking 10 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 9 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 8 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 7 Besar tk prov.	80,000,000	rangking 6 Besar tk prov.	80,000,000
Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal	Tidak tertanganinya pengembangan kurikulum oleh TPK secara struktural dan terprogram. Tersedianya fasilitas TPK kab. Tegal	100 SMP N/S	80 SMPN/S	20,000,000	90 SMPN/S	20,000,000	95 SMPN/S	20,000,000	98 SMPN/S	20,000,000	100 SMPN/S	20,000,000
Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pend. Anti Korupsi dan Pend. Lalu Lintas	Belum terimplementasi integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pend. Anti Korupsi dan Pend. Lalu Lintas. Terlaksananya pelatihan Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pend. Anti Korupsi dan Pend. Lalu Lintas	47 SMPN 49 SMP S	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000	47 SMPN 49 SMP S	150,000,000
Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan	88 sekolah N/S belum mengelola perpustakaan dan laboratorium sesuai standar pelayanan Minimal. Terlaksananya pelatihan pengelola laboratorium dan pustakawan	12 SMPN	50 SMPN/S	30,000,000	60 SMPN/S	30,000,000	70 SMPN/S	30,000,000	80 SMPN/S	30,000,000	88 SMPN/S	30,000,000

Pengadaan Alat Lab. IPA	55 SMP N/S belum terpenuhi Laboratorium IPA sesuai dengan SPM. Terpenuhiya alat laboratonum IPA	45 SMPN /S	10 SMP N/S	750,000,000	20 SMP N /S	750,000,000	30 SMP N /S	750,000,000	40 SMP N /S	750,000,000	55 SMP N /S	750,000,000
Fasilitasi Kantin Sehat Implementasi Pendidikan Karakter	Sejumlah 94 SMP N/S belum memiliki kantin sehat. Tersedianya fasilitas Kantin sehat	6 SMPN/S	10 SMP N/S	22,500,000	20 SMP N/S	22,500,000	30 SMP N/S	22,500,000	40 SMP N/S	22,500,000	50 SMP N/S	22,500,000
Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP	Sejumlah 100 Ks belum memiliki Kompetensi manajerial yang baik. Terkaksananya pelatihan Manajemen Kepala sekolah		80 SMP N/S	20,000,000	90 SMP N/S	20,000,000	95 SMP N/S	20,000,000	95 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000
Pengadaan Buku Perpustakaan	Sejumlah 88 SMP N/S belum memiliki perpustakaan yang berstandar. Tersedianya Buku Perpustakaan SMP	12 SMP N/S	10 SMP N/S	70,000,000	20 SMP N/S	70,000,000	30 SMP N/S	70,000,000	40 SMP N/S	70,000,000	50 SMP N/S	70,000,000
Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa	Sejumlah 70 SMP N/S belum memiliki buku mulok sesuai SK Gubernur. Tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa	30 SMP N/S	10 SMP N/S	30,000,000	20 SMP N/S	30,000,000	30 SMP N/S	30,000,000	40 SMP N/S	30,000,000	50 SMP N/S	30,000,000
Fasilitasi Kantin Kejujuran	Sejumlah 100 SMP N/S belum memiliki kantin kejujuran. Tersedianya 50 fasilitas kantin kejujuran		10 SMPN/S	50,000,000	20 SMPN/S	50,000,000	30 SMPN/S	50,000,000	40 SMPN/S	50,000,000	50 SMPN/S	50,000,000
Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP	Sebagian besar sekolah belum inovatif dalam pembuatan media pembelajaran. Telaksananya Pelatihan pembelajaran dan pembuatan media		70 SMP N /S	30,000,000	80 SMP N /S	30,000,000	90 SMP N /S	30,000,000	100 SMP N /S	30,000,000	100 SMP N /S	30,000,000

Sosialisasi dan Pelatihan PPDB Online SMP/MTs	Kewajiban 100 SMP N/ S menggunakan PPDB online. Terlaksananya pelatihan PPDB Online		40 % SMP N /S	20,000,000	50 % SMP N /S	20,000,000	60 % SMP N /S	20,000,000	70 % SMP N /S	20,000,000	80 % SMP N /S	20,000,000
Pengembangan Kegiatan 10 mapel MGMP Kab. Tegal	Sejumlah 12 Mapel melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara swadaya. Terwujudnya Kegiatan MGMP 10 mapel		10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000	10 Mapel MGMP	200,000,000
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal	Sebagian kegi Sekolah/ siswa berpartisipasi Lomba LPIR dan Lomba Pidato. Terlaksananya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal	5 Siswa	100 siswa	20,000,000	110 siswa	20,000,000	120 siswa	20,000,000	130 siswa	20,000,000	150 siswa	20,000,000
Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	Apresiasi dan gelar seni budaya dilaksanakan swadaya MGMP Mapel Seni budaya dan Prakarya. Terlaksananya Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	1	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	50,000,000
Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal	Budaya sekolah bersih dan program adiwiyata tidak optimal. Tersedianya fasilitas adiwiyata di tk SMP	1 SMP	10 SMP	30,000,000	20 SMP	30,000,000	30 SMP	40,000,000	30 SMP	30,000,000	40 SMP	30,000,000
Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	Lomba jurnalistik tidak diminati sekolah. Terlaksananya Pelatihan dan Jurnalistik Tingkat SMP		200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000	200 siswa	20,000,000
Penerbitan majalah siswa Kabupaten Tegal	Belum ada wadah kreatifitas menulis bagi siswa. Terwujudnya majalah siswa SMP Kab. Tegal		100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000	100 SMP N/S	20,000,000
SEKSI PENDIDIKAN TK/SD												
Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD	Meningkatnya prestasi siswa dibidang Seni dalam	750 Siswa	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000	750 Siswa	100,000,000

(MAPSI)												
Pelatihan Kurikulum	Terlaksananya Kurikulum sesuai dengan kurikulum yang baru	70 Satuan Pendidikan	70	30,000,000	70	30,000,000	70	30,000,000	70	30,000,000	70	30,000,000
Festifal Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains)	Terlaksananya KEGIATAN fis2n,osn,Siswa Berprestasi	180 Siswa	180	175,000,000	180	175,000,000	180	175,000,000	180	175,000,000	180	175,000,000
Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK/RA	Terlaksananya lomba Kreatifitas Siswa TK/RA	250 siswa	250	25,000,000	250	25,000,000	250	25,000,000	250	25,000,000	250	25,000,000
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB	Terlaksananya Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB	26825 Siswa	26850	445,000,000	26850	445,000,000	26850	445,000,000	26850	445,000,000	26850	445,000,000
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik												
Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik	Para pendidik formal dapat memenuhi persyaratan kualifikasi akademiknya	Pendidik sudah memenuhi kualifikasi minimal = 9.984 orang guru dan 3499 guru belum S-1	900 org		850 org		750 org		600 org		399 org	
Menyalurkan bantuan biaya S-1 dari APBN	Meringankan beban biaya pendidikan bagi guru	200 orang guru @ 3.500.000,- = Rp.700.000.000,-	200 org	700000000	150 org	525000000	100 org	350000000	65 org	227500000	45 org	157500000
Peningkatan profesional pendidik												
2.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan												

a. Diklat pendidik	Meningkatkan kompetensi profesi pendidik	Memfasilitasi permintaan peserta diklat dari provinsi, lembaga diklat lainnya	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000	1000 org	200.000.000
b. Diklat calon kepala sekolah	Membekali teori dan pengalaman praktik sebagai kepala sekolah agar menghasilkan calon kepala sekolah yang kompeten	226 calon KS yang belum didiklat dari hasil seleksi tahun 2015	226 org	678.000.000			131 org	458.000.000,-			68 org	272.000.000,-
2.2. Kegiatan sertifikasi guru	Memenuhi guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik	633 orang melalui PLPG 2015	422 org	25.000.000	125 org		25 org					
2.3. Kegiatan induksi guru baru	Memiliki kemampuan berorientasi dengan proses pembelajaran profesional dalam konteks pada satuan pendidikan bagi pendidik baru	313 guru baru										
2.4. Kegiatan kolektif guru (KKG, KKKS, MGMP, MGBK, MKKS)	Terfasilitasinya para pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB)	Terbentuknya koordinator PKB. Wadah kegiatan pembinaan profesi para pendidik dan tenaga kependidikan	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000	20 pertemuan	40.000.000
Pengelolaan data kepegawaian tendik	Pengelolaan data kepegawaian menggunakan SIM tendik	Data kepegawaian tersedia dengan pengolahan secara manual	1 sim tendik	50.000.000								

Pengelolaan data aneka tunjangan dan kesejahteraan (tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan bantuan kesejahteraan)	Peningkatan kesejahteraan pendidik melalui aneka tunjangan	Tunjangan profesi = 5.266 org. Tunjangan fungsional 750 org	5.688 org / 750 org		5.813 org / 750 org		6.000 org / 750 org		6.150 org / 750 org		6.300 org / 7500 org	
Penilaian Kinerja												
3.1. Penilaian Kinerja Guru (PKG)	Menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Pembinaan karir dan jabatan guru	6.981 guru PNS	7.000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000	7000 org	70.000.000
3.2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	Penilaian kinerja KS. Tersedianya data penilaian kinerja kepala sekolah masa tugas 1 dan/ 2	686 org dan 100 org kepala sekolah Rp.75.000.000,-	579 org dan 207 org	123.500.00	515 org dan 271 org		730 org dan 56 org		620 org dan 168 org		607 org dan 179 org	
3.3 Penilaian Kinerja Penilik	Menentukan derajat mutu kinerja penilik. Pembinaan karir dan jabatan penilik	53 orang	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000	70 org	14.000.000
3.4. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	Menentukan derajat mutu kinerja pengawas sekolah. Pembinaan karir dan jabatan pengawas sekolah	77 orang	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00	86 org	17.200.00
Pengelolaan kenaikan jabatan dan kepegawaian tenaga pendidik	Memjamin kelangsungan pembinaan karir, jabatan dan kepegawaian tenaga pendidik	(6.981 pendidik PNS). Naik pangkat dan jabatan 1.500 org Rp.75.000.000,-	1.750 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000	7.000 gr	80.000.000
Pembinaan personal dan penyelesaian kasus kepegawaian tenaga pendidik	Penegakan disiplin pegawai dan diselesaikan atas kasus dan pelanggaran disiplin	7 kasus pembinaan keluarga dan 2 kasus indisipliner	50 org		50 org		45 org		45 org		40 org	

Seleksi calon Kepala Sekolah, Pengawas sekolah, Penilik	Tercukupinya formasi kepala sekolah, pengawas dan penilik	50 orang Rp 50.000.000,-			300 org	300.000.000			150 org	150.000.000		
Serah terima jabatan tenaga kependidikan	Tercapainya pelayanan prima Bidang Tendik	Rp.10.000.000,-	1 kali	15.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000
Penilaian dan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi												
a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan prestasi kinerja, motivasi kerja dan pengakuan serta penghargaan pada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal	100 org Rp.100.000.000,-	100 org	110.000.000	100 org	110.000.000	100 org	120.000.000	100 org	120.000.000	100 org	125.000.000
b. Jambore PNF!	Peningkatan kualitas PTX PAUD Kab. Tegal	80 orang pendidik Rp.75.000.000,-	100 org	100.000.000	110 org	150.000.000	120 org	150.000.000	150 org	150.000.000	200 org	150.000.000
c. OSN Guru	Peningkatan mutu guru, pembinaan, motivasi dan pengakuan potensi serta penghargaan bagi para guru		42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000	42 orang	30.000.000
Pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Tendik												
Bantuan peningkatan kualifikasi ke S-1 bagi pendidik PAUD dan Pendidikan Formal												
a. Pendidik Paud	Peningkatan kualifikasi pendidikan pendidik PAUD (TK/KB/TPA/SPS)	44 orang pendidik Rp.154.000.000,-	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000	50 org	175.000.000
b. Pendidik Pendidikan Formal	Peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi pendidik pendidikan formal	150 orang pendidik Rp.525.000.000,-	150 org	525.000.000	150 org	525.000.000	100 org	350.000.000	100 org	350.000.000	75 org	262.500.000
Bantuan kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti												

a. Pendidik Paud	Peningkatan kesra PAUD (TK) dan peningkatan kualitas pendidik PAUD	258 orang guru , biaya Rp 586.950.000,-	258 org	586.950.000	260 org	591.500.000	280 org	637.000.000	290 org	659.750.000	300 org	682.500.000
b. Pendidik Pendidikan Formal	Peningkatan kesejahteraan guru wiyala bhakti Pendidikan formal	577 orang guru, biaya Rp.1.312.675.000,-	600 org	1.365.000.000	600 org	1.365.000.000	600 org	1.365.000.000	550 org	1.251.250000	550 org	1.251.250000
Bantuan perjalanan tutor PAUD Non Formal	Peningkatan kesra pendidik PAUD (TK) dan peningkatan profesional pendidik	110 orang PTK Paud Anggaran Rp 200.000.000,-	150 org	270.000.000	160 Org	188.000.000	170 org	306.000.000	180 org	324.000.000	200 org	360.000.000
Bantuan Pengembangan Profesi	Pengembangan kreatifitas para pendidik dalam mengembangkan profesinya											
SIDANG PEMBINAAN PAUDNI												
Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	Terpenuhinya sarpras PAUD sejumlah 1.000 lembaga sesuai standar pendidikan anak usia dini pada tahun 2019	24 Paket										
- Mebelair (Meja, Kursi dan Papan Tulis)			3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000
- RKB			3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000
Bantuan Pengadaan APE	Terpenuhinya APE PAUD SEJUMLAH 850 lembaga pada tahun 2019	50 Lembaga PAUD	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000
Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	Terpenuhinya pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu di Kab. Tegal	4 Lembaga	3	900,000,000	3	900,000,000	3	900,000,000	3	900,000,000	3	900,000,000
Penyempurnaan Unit Gedung Baru (UGB)	Terpenuhinya unit gedung baru bagi PAUD Terpadu di 18 kecamatan pada tahun 2019	4 kecamatan	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000

Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Meningkatnya prestasi dan keterampilan AUD di semua lembaga (18 kecamatan) dari semua cabang mata lomba minimal juara tingkat provinsi pada tahun 2019	9 mata lomba juara tingkat kabupaten dan 2 mata lomba juara tingkat provinsi	1	15,000,000	1	25,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Meningkatnya jumlah gugus berprestasi dan lembaga KB/TK berprestasi sejumlah 18 gugus dan PAUD Terpadu berprestasi 56 lembaga pada tahun 2019	Gugus di 2 kecamatan dan KB/TK di 4 kecamatan	1	18,000,000	1	20,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000
Palatihan Kopertensi Tenaga Pendidik PAUD	Meningkatnya kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD sejumlah 8.506 PTK PAUD pada tahun 2019	3.226 PTK	60 PTK	50,000,000	80 PTK	75,000,000	120 PTK	100,000,000	140 PTK	120,000,000	160 PTK	150,000,000
Rintisan PAUD	Terselenggaranya lembaga PAUD di 286 desa di Kabupaten Tegal pada tahun 2019	8 desa belum ada lembaga PAUD	2	90,000,000	2	90,000,000	2	90,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Terperuhnya jumlah lembaga PAUD penerima BOP sejumlah 1.000 lembaga pada tahun 2019	563 lembaga	153	1,101,600,000	169	1,216,800,000	189	1,360,800,000	207	1,490,400,000	226	1,627,200,000
Penguatan Kelembagaan PAUD	Terbentuknya lembaga PAUD Unggulan Terpadu, Holistik, Integratif di 18 kecamatan, minimal masing-masing kecamatan 3 lembaga PAUD Unggulan Terpadu pada tahun 2019	4 kecamatan sejumlah 5 lembaga PAUD Unggulan Terpadu	2	50,000,000	3	75,000,000	5	125,000,000	7	175,000,000	11	275,000,000
Motivasi dan Stimulasi Penyelenggaraan PAUD	Terbentuknya lembaga PAUD berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi sejumlah 25 lembaga penyelenggara PAUD berprestasi pada tahun 2019	4 lembaga PAUD Berprestasi, terdiri dari 2 TK dan 2 KB	1	10,000,000	2	20,000,000	3	30,000,000	4	40,000,000	5	50,000,000

Bantuan Organisasi Mitra PNF	Meningkatnya kegiatan organisasi mitra PAUD/PNF yang mandiri pada tahun 2019	IGTKI, HIMPAUDI, FORUM PAUD, PKK, GOPYKI, MUSLIMAT NU, AISIYAH	2	16,000,000	3	24,000,000	4	32,000,000	6	48,000,000	8	64,000,000
Bantuan Taman Bermain Anak Usia Dini	Terbentuknya lembaga taman bermain anak usia dini sebanyak 20 lembaga pada tahun 2019	1 lembaga taman bermain AUD	2	50,000,000	2	50,000,000	4	100,000,000	5	125,000,000	5	125,000,000
Bantuan Lomba Gugus PAUD	Meningkatnya peran dan fungsi gugus dan PKG PAUD di 18 kecamatan pada tahun 2019	Gugus dan PKG yang berjalan optimal sesuai peran dan fungsinya di 8 kecamatan (30%)	11	110,000,000	12	120,000,000	13	130,000,000	14	140,000,000	15	150,000,000
Bantuan Parenting	Terbentuknya lembaga PAUD Penyelenggara Parenting di 36 lembaga pada tahun 2019	4 lembaga PAUD	1	15,000,000	2	30,000,000	4	60,000,000	6	90,000,000	8	120,000,000
Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	Terpenuhnya Penyelenggaraan Evaluasi Semesteran bagi seluruh peserta didik Paket A, B dan C sampai tahun 2019	Paket A : 6 Lembaga, Paket B : 26 Lembaga, Paket C : 32 Lembaga.	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B	Terpenuhnya Penyelenggaraan UN bagi peserta didik Paket A= 59, B= 519 pada tahun 2019	Paket A . 4 Lembaga, Paket B : 16 Lembaga.	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C	Terpenuhnya Penyelenggaraan UN bagi peserta didik Paket C= 1.377 sampai dengan tahun 2019	Paket C : 28 Lembaga	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Meningkatnya kesejahteraan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan PKBM dan Porpes sampai dengan tahun 2019	Tutor Paket B= 32 orang dan Paket C= 32 orang	1	300,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A	Terlayannya warga masyarakat miskin atau faktor lain yang belum terlayani pendidikan dasar (SD/MI) sejumlah 780 warga belajar pada tahun 2019	133 warga belajar yang terdiri dari kelas IV, V dan VI	2	20,000,000	3	30,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Paket B	Terlayannya warga masyarakat miskin atau faktor lain yang belum terlayani pendidikan dasar (SMP/MTs) sejumlah 15.650 warga belajar pada tahun 2019	1.433 warga belajar yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX	15	225,000,000	16	240,000,000	17	255,000,000	18	270,000,000	20	300,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C	Terlayannya warga masyarakat miskin atau faktor lain yang belum terlayani pendidikan dasar (SMA/MA) sejumlah 7.605 warga belajar pada tahun 2019	3.052 warga belajar yang terdiri dari kelas X, XI, dan XII	2	73,000,000	4	146,000,000	5	182,500,000	6	219,000,000	7	255,500,000
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)	Keikutsertaan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi Jawa Tengah	24 Lembaga PKBM	1	10,000,000	1	15,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000
Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)	Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda di pedesaan sejumlah 3.400 orang pada tahun 2019	824 orang yang tersebar di 7 desa vokasi dan 4 LKP (20%)	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
Penguatan Manajemen Desa Vokasi	Menunjang kegiatan program kursus kewirausahaan desa dan HAI	18 Kecamatan	6	90,000,000	10	150,000,000	15	225,000,000	17	255,000,000	20	300,000,000
Program Penuntasan Buta Aksara Kab. Tegal	Jumlah Buta Aksara Kab. Tegal Usia 15-59 tahun masih 50.339 orang.	3.015 orang	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000	1006	3,621,600,000

Fasilitasi Keaksaraan Dasar	Tertayarnya warga masyarakat buta huruf keaksaraan dasar sejumlah 5.737 warga belajar pada tahun 2019	2.750 warga belajar keaksaraan dasar se kabupaten Tegal	275	990,000,000	425	1,530,000,000	550	1,980,000,000	650	2,340,000,000	700	2,520,000,000
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan	Tertayarnya warga masyarakat buta huruf keaksaraan lanjutan sejumlah 9.737 warga belajar pada tahun 2019	400 warga belajar keaksaraan lanjutan se Kabupaten Tegal	60	276,000,000	170	782,000,000	370	1,702,000,000	100	460,000,000	100	460,000,000
Pengembangan PKBM	Meningkatnya jumlah PKBM yang mandiri sejumlah 24 lembaga PKBM pada tahun 2019	3 PKBM terakreditasi lembaga dan program yang sudah mandiri	1	25,000,000	3	75,000,000	5	125,000,000	7	175,000,000	9	225,000,000
Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)	Meningkatnya jumlah lembaga LKP yang kuat sejumlah 50 LKP pada tahun 2019	10 Lembaga LKP yang kuat	3	75,000,000	4	100,000,000	5	125,000,000	6	150,000,000	7	175,000,000
Kelompok Belajar Usaha (KBU)	Berkembangnya jumlah warga masyarakat untuk belajar usaha dalam kelompok dalam memanfaatkan potensi lokal sejumlah 60 kelompok pada tahun 2019	15 KBU yang berkembang dan berjalan di 12 lembaga PKBM			8	80,000,000	9	90,000,000	10	100,000,000	11	110,000,000
Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Meningkatkan daya baca masyarakat	18 Kecamatan	3	30,000,000	8	80,000,000	9	90,000,000	10	100,000,000	11	110,000,000
Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan keadilan Gender di semua sektor kegiatan	18 Kecamatan	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000
Peningkatan Sarana Prasarana Nonformal	Meningkatkan sarana dan prasarana PKBM	18 Kecamatan	4	260,000,000	5	325,000,000	6	390,000,000	7	455,000,000	8	520,000,000
Lomba Inovasi Pembelajaran bagi Tutor/Pamong Belajar Program Paket B	Keikutsertaan lomba tingkat Nasional	2 PKBM/SKB	2	100,000,000	3	150,000,000	4	200,000,000	5	250,000,000	6	300,000,000

Cerdas Cermat bagi peserta didik Program Paket B	Keikutsertaan lomba tingkat Nasional	2 PKBM/SKB	5	250.000.000	6	300.000.000	7	350.000.000	8	400.000.000	9	450.000.000
Lomba Keterampilan (unjuk kerja keterampilan) bagi peserta didik Program Paket B	Keikutsertaan lomba tingkat Nasional	2 PKBM/SKB	7	350.000.000	8	400.000.000	9	450.000.000	10	500.000.000	11	550.000.000
BIDANG BINA PROGRAM												
Progra Pelayanan Manajemen Pendidikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta pelaporan	-	-	-	-	-	6 Dokumen Perencanaan dan 12 Dokumen Pelaporan	50.000.000	8 Dokumen Perencanaan dan 12 Dokumen Pelaporan	60.000.000	6 Dokumen Perencanaan dan 12 Dokumen Pelaporan	70.000.000
	Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	6 Pendataan	100.000.000	6 Pendataan	100.000.000	6 Pendataan	100.000.000
BIDANG KEBUDAYAAN												
Program Pengembangan Nilai Budaya				2.308.800		2.354.976		2.508.049		2.688.628		2.914.472
	Jumlah pertunjukan seni	3	4		3		3		3		3	3
	Jumlah pameran seni	1	0		1		1		1		1	1
	Jumlah misi/muhibah kesenian	0	2		1		1		1		1	1
	Jumlah sarana pertunjukan seni	1	2		10		15		19		19	19
	Jumlah pelaku seni yang dibina	3.110	90		3.110		3.110		3.110		3.110	3.110
	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	311	70		343		360		378		397	397
	Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	0	2		4		4		4		4	4
	Jumlah maestro seni	1	1		3		3		3		3	3
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				235.000		239.700		255.280		273.660		296.647
	Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3	7		3		3		3		3	3
	Jumlah naskah kuno yang dikaji	1	1		1		1		1		1	1
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				687.000		700.740		746.288		800.020		867.221
	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2	-		2		2		2		2	2

- 3. Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.**
- 4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.**
- 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .**

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai kerangka agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan sistem yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan sistem inovasi daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Kerangka pembangunan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sistem inovasi daerah adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap.

Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

1. Kerangka umum bagi inovasi,

yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi. Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi di daerah.

2. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorpsi dunia usaha,

yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara sementara atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara melekat dan menjalankan fungsi koordinasi. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.

3. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi,

yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang. Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Penelitian dan pengembangan yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya

penelitian dan pengembangan tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada dan atau dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsiserta difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.

4. Budaya inovasi

yaitu membangun budaya inovasi Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.

5. Sistem inovasi dan klaster industri,

yaitu menumbuh kembangkan sistem inovasi dan menumbuh kembangkan klaster (industri) nasional dan daerah Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.

6. Perkembangan dunia,

yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.

7. Afirmasi wilayah,

yaitu pengembangan wilayah tertinggal Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generik sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.

8. Afirmasi pengungkit,

yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain *telecenter* dan pemerintahan berbasis elektronik.

Delapan agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD merupakan kerangka kebijakan. Dalam struktur (hierarki) perencanaan strategis (*strategic planning*), yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arrah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam kerangka pembangunan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, Sistem Inovasi Daerah melingkupi RPJMD ini secara keseluruhan sebagai pendekatan siklus pembangunan. Sebagai kerangka pembangunan yang melingkupi RPJMD, telah diidentifikasi 9 (Sembilan) kerangka pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka pembangunan dalam

RPJMD ini disesuaikan dengan kebijakan unggulan pemerintah daerah yaitu Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal juga memperhatikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya Pembangunan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna), yaitu insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut maka fokus pembangunan pendidikan pada Tahun 2014 – 2019 adalah penguatan pelayanan pendidikan. Hal ini tergambar pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif. Layanan prima pendidikan nasional yang dimaksud adalah adalah layanan pendidikan yang (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; (4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan (5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Hal ini dikemas dalam Misi 5K Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI yaitu :

1. Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan;
2. Memperluas **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan;
3. Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan;
4. Mewujudkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan; dan
5. Menjamin **Kepastian** Memperoleh Layanan Pendidikan

Berdasarkan identifikasi permasalahan , telaahan visi dan misi Bupati Tegal terpilih serta telaahan terhadap rencana strategis, pembangunan pendidikan dan kebudayaan maka dapat di tentukan isu yang dapat dijadikan fokus pembagunan pendidikan lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan.
3. Masih rendahnya lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah atas.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas sumber daya manusia terampil, potensial, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulusan ujian nasional masih dibawah rata-rata provinsi / nasional.
6. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga

kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standart kompetensi dan standart pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.

7. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, social, akademik, dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter, dan berwawasan, lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal diseluruh jenjang pendidikan dari pendidikan PAUD , pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Belum tergalinya budaya lokal Tegal dan kurang optimalnya pemeliharaan benda cagar budaya di Kabupaten Tegal.
9. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan dan kebudayaan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan dan kebudayaan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan dan kebudayaan.

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan pendidikan beberapa telaah Rencana Strategis yang dapat disimpulkan dalam rencana kerja pembangunan pendidikan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata terjangkau setara dan berkeadilan di setiap desa.
2. Peningkatan layanan kepastian dan jaminan Pendidikan Dasar yang bermutu merata, terjangkau, setara dan relevan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal.
3. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang

Sekolah Menengah Atas.

4. Peningkatan layanan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal.
5. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan persentase siswa lulus ujian nasional, dengan rata-rata nilai yang baik serta peningkatan prestasi belajar dan akademik.
6. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart kompetensi dan standart pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Peningkatan layanan pendidikan kecakapan hidup (*Life Skill*) yang mencakup kecakapan personal, social, akademik, dan vocational, dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan.
8. Peningkatan pembinaan pelaku seni dan pemeliharaan benda cagar budaya di Kabupaten Tegal
9. Peningkatan penyelenggaraan system tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan.

Mendasari pada permasalahan-permasalahan diatas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh Kecamatan;
3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas

- tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah;
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 5. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal;
 6. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal;
 7. Mengembangkan dan meningkatkan seni dan even kesenian dan memelihara benda cagar budaya di Kabupaten Tegal;
 8. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan dengan mengedepankan konsep manajemen berbasis sekolah;
 9. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan terobosan sesuai dengan tuntutan perkembangan secara keseluruhan baik nasional, global maupun internasional. Hal ini perlu dilakukan agar visi untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki daya saing dapat dicapai. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, antara lain mencakup :

1. Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik;
2. Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya;
3. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
4. Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa;
5. Pengembangan Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha;

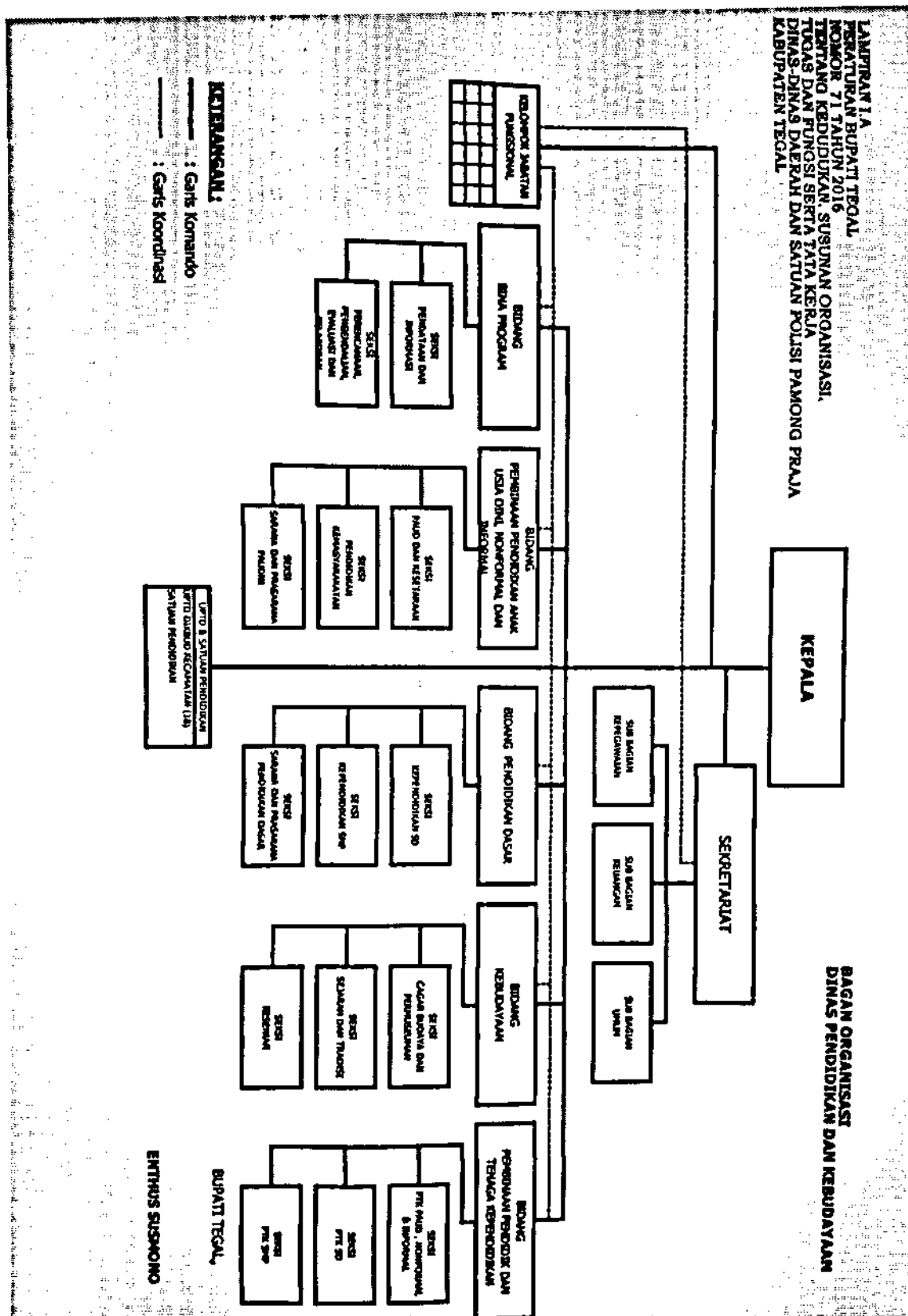
6. Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan;
7. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan;
8. Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan;
9. Penyediaan Buku Teks Murah;
10. Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
11. Penguatan Kemitraan Strategis antara Dunia Pendidikan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha;
12. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal;
13. Reformasi Birokrasi;
14. Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
15. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana;
16. Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;

Indikator kinerja yang akan diukur pada tahun 2018 ini merupakan indikator kinerja minimal, mengingat indikator-indikator ini tercantum dalam RPJMD. Indikator ini tidak mewakili seluruh sasaran yang ada. Hanya mengukur 3 (tiga) sasaran saja, yaitu : Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, Meningkatkan dan memadainya kualifikasi tenaga pendidik; dan Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kebudayaan.

Untuk mencapai target kinerja serta melaksanakan tugas pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal agar seluruh permasalahan dapat diatasi dan tantangan kedepan dapat dihadapi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk bisa berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja amanah. Untuk itu, dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang seluruh komponennya diharapkan mampu

melaksanakan pembangunan pendidikan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana Gambar 10 berikut ini :

Gambar 10
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016



Adapun tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, sebagaimana Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal memikul tugas dan tanggungjawab yang besar. Bupati Tegal memberikan kepercayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena melalui peran serta aktif seluruh komponen pemangku kepentingan maka pembangunan pendidikan akan berhasil. Untuk itu, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal juga bersumber dari usulan dari para pemangku kepentingan, yang disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Usulan kegiatan juga disampaikan melalui Anggota Legislatif pada saat melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan langsung, baik dari masyarakat maupun Satuan Pendidikan melalui Kepala Sekolah langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana, dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi
11. Program Pengembangan Nilai Budaya
12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sedangkan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2019 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan pendidikan, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019. Kegiatan dimaksud, selain diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN. Rekapitulasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Tahun 2019 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tegal Tahun 2019, tertera dalam Lampiran.

Namun, secara detail, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tegal Tahun 2019, APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, APBN Tahun 2019, dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2019, dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2 Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini.

BAB IV PENUTUP

Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kekerjaan (*employment*); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh.

Di era sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pendidikan tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi salah satu hak mendasar yang harus diterima oleh setiap manusia. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan manusia, maka akan semakin besar pula kualitas pendidikan yang diharapkan. Sekolah yang tadinya didirikan berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana tertera pada RPJMN 2015-2019, pendidikan merupakan prioritas kedua dari sebelas prioritas pembangunan. Pendidikan diharapkan memberikan andil dalam menjawab isu strategis peningkatan dan perluasan kesejahteraan

masyarakat, khususnya dalam peningkatan pembangunan sumberdaya manusia. Di samping itu, pendidikan juga menjadi faktor inti dalam penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda yang berkompeten dan mampu menjawab kebutuhan zaman

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal harus disusun sebaik mungkin dan menganut azas perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif dipilih oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal dikarenakan memiliki manfaat, diantaranya : a) Bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka serta mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi); b) Dengan adanya *partisipasi masyarakat* dalam melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif akan mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan, akan diupayakan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Tegal, APBD Provinsi Jawa Tengah , APBN maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, usulan-usulan ini akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan pada wilayahnya masing-masing. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tegal disampaikan kepada Bupati Tegal melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tegal. Program dan Kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, usulan juga disampaikan melalui Bappeda Kabupaten Tegal, yang secara kolektif akan menyampaikannya ke Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga halnya dengan program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya disulkan melalui APBN. Disampaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini disusun, dengan harapan dapat dilaksanakan semua agar tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tegal dapat tercapai sesuai dengan target

kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
		Jumlah Anggaran	59,961,793,000						
1	1.01.1.01.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,636,200,000	2,145,697,091	81.39	490,502,909	18.61	Tinggi	
1	1.01.1.01.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000	7,998,000	99.98	2,000	0.03	Sangat Tinggi	Sisa operasional
2	1.01.1.01.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320,000,000	163,321,560	51.04	156,678,440	48.96	Rendah	Anggaran utk UPTD Dikbud Kecamatan sudah ada DPA khusus operasional UPTD
3	1.01.1.01.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	448,200,000	308,360,000	68.80	139,840,000	31.20	Sedang	Pengalihan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ke Propinsi
4	1.01.1.01.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	150,000,000	147,910,500	98.61	2,089,500	1.39	Sangat Tinggi	Sisa hasil pengadaan
5	1.01.1.01.1.01.09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	175,000,000	168,377,800	96.22	6,622,200	3.78	Sangat Tinggi	Peralatan masih baik sehingga anggaran perawatan yang dicairkan tdk sepenuhnya
6	1.01.1.01.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200,000,000	133,139,200	66.57	66,860,800	33.43	Sedang	selisih kontraktual pelaksanaan
7	1.01.1.01.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	90,000,000	85,041,000	95.60	3,959,000	4.40	Sangat Tinggi	Sisa pengadaan barang cetakan
8	1.01.1.01.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	100,000,000	95,243,500	95.24	4,756,500	4.76	Sangat Tinggi	Sisa hasil pengadaan
9	1.01.1.01.1.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,000,000	63,818,900	85.09	11,181,100	14.91	Tinggi	Sudah ada jasa penyediaan perbaikan peralatan kerja sehingga anggaran pengisian tabung pemadam tdk direalisasi
10	1.01.1.01.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	13,920,000	55.68	11,080,000	44.32	Rendah	Sisa dari anggaran dengan pengeluaran riil
11	1.01.1.01.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	250,000,000	246,918,000	98.77	3,082,000	1.23	Sangat Tinggi	Efisiensi makan minum, rapat dinas Dikbud dan honor pejabat
12	1.01.1.01.1.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150,000,000	149,667,521	99.78	332,479	0.22	Sangat Tinggi	Sesuai kegiatan
13	1.01.1.01.1.01.19	Rapat -rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	20,000,000	20,000,000	100.00	-	-	Sangat Tinggi	-
14	1.01.1.01.1.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor	125,000,000	122,162,500	97.73	2,837,500	2.27	Sangat Tinggi	Sisa hasil pengadaan
15	1.01.1.01.1.01.26	Blaya Operasional UPTD DIKBUD Kecamatan dan SKB	500,000,000	418,818,610	83.76	81,181,390	16.24	Tinggi	Efisiensi jasa operasional dan SPPD luar daerah tdk direalisasi
2	1.01.1.01.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,167,442,000	1,104,155,547	94.58	63,286,453	5.42	Sangat Tinggi	
16	1.01.1.01.1.02.10	Pengadaan Mebeleur	85,500,000	82,348,000	96.31	3,152,000	3.69	Sangat Tinggi	Sisa hasil pengadaan

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
17	1.01.101.1.02.11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	406,942,000	394,768,230	97.01	12,173,770	2.99	Sangat Tinggi	Selisih hasil pengadaan
18	1.01.101.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200,000,000	193,192,000	96.60	6,808,000	3.40	Sangat Tinggi	Sisa Honor THL karena meninggal dunia
19	1.01.101.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,000,000	172,554,517	86.28	27,445,483	13.72	Tinggi	efisiensi kegiatan operasional BBM dan bea STNK
20	1.01.101.1.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	75,000,000	67,648,800	90.20	7,351,200	9.80	Tinggi	Gedung masih baru sehingga bea perawatan seperlunya
21	1.01.101.1.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200,000,000	193,644,000	96.82	6,356,000	3.18	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual pelaksanaan
3	1.01.101.1.05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	50,000,000	40,708,500	81.42	9,291,500	18.58	Tinggi	
22	1.01.101.1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	40,708,500	81.42	9,291,500	18.58	Tinggi	Efisiensi operasional dan Sisa SPPD
4	1.01.101.1.06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	315,775,000	305,947,750	96.89	9,827,250	3.11	Sangat Tinggi	
23	1.01.101.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	46,426,750	92.85	3,573,250	7.15	Sangat Tinggi	Efisiensi anggaran dari kegiatan operasional
24	1.01.101.1.06.05	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	265,775,000	259,521,000	97.65	6,254,000	2.35	Sangat Tinggi	Indek harga lebih tinggi dari DPA
5	1.01.101.1.15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	1,963,060,000	1,822,338,550	92.83	140,721,450	7.17	Sangat Tinggi	
25	1.01.101.1.15.01	Pembangunan gedung sekolah	283,060,000	277,354,850	97.98	5,705,150	2.02	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
26	1.01.101.1.15.70	Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal	135,000,000	134,809,000	99.86	191,000	0.14	Sangat Tinggi	Sisa harga nego belanja bahan peralatan dan pelatihan
27	1.01.101.1.15.97	Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD DAK Non Fisik)	120,000,000	120,000,000	100.00			Sangat Tinggi	
28	1.01.101.1.15.100	Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Non Formal	200,000,000	196,707,000	98.35	3,293,000	1.65	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
29	1.01.101.1.15.101	Pengadaan Mebelair FAUD Non Formal	150,000,000	147,482,000	98.32	2,518,000	1.68	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
30	1.01.101.1.15.104	Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	200,000,000	198,932,000	99.47	1,068,000	0.53	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
31	1.01.101.1.15.105	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos PAUD (APE Indoor dan APE Outdoor)	25,000,000	24,140,000	96.56	860,000	3.44	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
32	1.01.101.1.15.106	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	75,000,000	60,710,000	80.95	14,290,000	19.05	Tinggi	Efisiensi jasa dekorasi, SPPD dalam / luar yang tidak bisa di SPJ kan
33	1.01.101.1.15.107	Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa Bantuan Provinsi Tahun 2014)	640,000,000	537,326,000	83.96	102,674,000	16.04	Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan

No.	Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
34	1.01.1.01.1.15.108	Penyempurnaan Ruang Kelas TK dan PKBM	75,000,000	74,500,000	99.33	500,000	0.67	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
35	1.01.1.01.1.15.109	Operasional Pendirian PAUD	60,000,000	50,377,700	83.96	9,622,300	16.04	Tinggi	Efisiensi sewa sound system, nara sumber SPPD dim daerah serta nego APE yang tidak bisa di SPJ kan
6	2.10.1.01.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	120,000,000	99,991,245	83.33	20,008,755	16.67	Tinggi	
36	2.10.1.01.1.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	120,000,000	99,991,245	83.33	20,008,755	16.67	Tinggi	Efisiensi operasional dan sisa bea internet
7	2.12.1.01.1.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15,000,000	14,530,000	96.87	470,000	3.13	Sangat Tinggi	
37	2.12.1.01.1.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	15,000,000	14,530,000	96.87	470,000	3.13	Sangat Tinggi	Honor Panitia pengadaan barang / jasa tidak digunakan
8	2.16.1.01.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1,020,000,000	1,004,330,750	98.46	15,669,250	1.54	Sangat Tinggi	
38	2.16.1.01.1.15.04	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	30,000,000	26,592,000	88.64	3,408,000	11.36	Tinggi	Sisa SPPD
39	2.16.1.01.1.15.06	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya	590,000,000	582,922,250	98.80	7,077,750	1.20	Sangat Tinggi	Sisa SPPD dan efisiensi nego belanja sewa perlengkapan, jasa kantor serta makan minum.
40	2.16.1.01.1.15.10	Penjamesan Makan Amangkurat	75,000,000	73,737,400	98.32	1,262,600	1.68	Sangat Tinggi	Efisiensi makan minum dan honor penjammas diatas index
41	2.16.1.01.1.15.11	Pengiriman Duta Seni ke Luar Negeri	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	
42	2.16.1.01.1.15.12	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Peringatan Hari Jadi)	200,000,000	196,903,300	98.45	3,096,700	1.55	Sangat Tinggi	Efisiensi LS pengadaan pakaian, sewa perlengkapan, makan minum
43	2.16.1.01.1.15.13	Pentas Seni Pewayangan Luar daerah	125,000,000	124,175,800	99.34	824,200	0.66	Sangat Tinggi	Sisa SPPD
9	1.01.1.01.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	43,823,719,000	42,116,157,969	96.10	1,707,561,031	3.90	Sangat Tinggi	
44	1.01.1.01.1.16.19	Pengadaan Mebelair Sekolah	790,280,000	671,053,000	84.91	119,227,000	15.09	Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
45	1.01.1.01.1.16.79	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Sen SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten	125,000,000	121,500,000	97.20	3,500,000	2.80	Sangat Tinggi	Efisiensi Honor PNS, foto copy, sewa gedung, makan minum
46	1.01.1.01.1.16.83	Regrouping SD	25,000,000	-	-	25,000,000	100.00	Sangat Rendah	Tidak ada seleksi Kasek sehingga tidak ada kebijakan penempatan Kasek maka kegiatan regrouping ditiadakan
47	1.01.1.01.1.16.84	Penataan Lingkungan Sekolah	3,334,500,000	3,301,432,750	99.01	33,067,250	0.99	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
48	1.01.1.01.1.16.88	Pengadaan Peralatan TIK SMP	1,200,000,000	1,177,863,000	98.16	22,137,000	1.84	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
49	1.01.1.01.1.16.89	Latihan Ujian Nasional / Try Out SMP / MTs.	60,000,000	49,382,750	82.30	10,617,250	17.70	Tinggi	Sisa dari lelang pejabat pengadaan
50	1.01.1.01.1.16.90	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs	400,000,000	301,011,000	75.25	98,989,000	24.75	Sedang	Sisa dari anggaran dengan kegiatan pengeluaran riil

No.	Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
51	1.01.1.01.1.16.91	Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islami (MAPSI) SMP	100,000,000	90,548,000	90.55	9,452,000	9.45	Tinggi	Sisa dari anggaran dengan kegiatan pengeluaran riil
52	1.01.1.01.1.16.92	Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP	50,000,000	42,157,000	84.31	7,843,000	15.69	Tinggi	Efisiensi makan minum sesuai kebutuhan
53	1.01.1.01.1.16.93	Fasilitasi kegiatan Tim pengembang kurikulum SMP Kab. Tegal	25,000,000	10,270,000	41.08	14,730,000	58.92	Sangat Rendah	Sisa penggunaan dana sesuai kebutuhan
54	1.01.1.01.1.16.94	Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas	20,000,000	17,271,000	86.36	2,729,000	13.65	Tinggi	Sisa dari anggaran dengan kegiatan pengeluaran riil
55	1.01.1.01.1.16.98	Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP	20,000,000	19,057,500	95.29	942,500	4.71	Sangat Tinggi	Sisa dari anggaran dengan kegiatan pengeluaran riil
56	1.01.1.01.1.16.102	Pengembangan Kegiatan 11 Mata Pelajaran MGMP Kabupaten Tegal	130,000,000	122,692,000	94.38	7,308,000	5.62	Sangat Tinggi	Pencairan dana sesuai kebutuhan
57	1.01.1.01.1.16.104	Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP	30,000,000	19,745,000	65.82	10,255,000	34.18	Rendah	Sisa dari anggaran dengan kegiatan pengeluaran riil
58	1.01.1.01.1.16.105	Fasilitasi kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kab. Tegal	75,000,000	-	-	75,000,000	100.00	Sangat Rendah	Masuk anggaran perubahan tdk disetujui (tdk muncul) sehingga kegiatan tdk dilaksanakan
59	1.01.1.01.1.16.106	Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	20,000,000	14,043,000	70.22	5,957,000	29.79	Sedang	Kegiatan dilaksanakan hanya tingkat kabupaten ditingkat propinsi tidak dilaksanakan
60	1.01.1.01.1.16.107	Pelatihan Kurikulum SD	50,000,000	48,926,500	97.85	1,073,500	2.15	Sangat Tinggi	Efisiensi honor panitla, foto copy, lembur dan perjalanan dinas
61	1.01.1.01.1.16.109	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa Siswa TK / RA	30,000,000	25,892,000	86.31	4,108,000	13.69	Tinggi	Sewa kostum tdk bisa direalisasi karena di DPA tidak ada anggaran kegiatan itu
62	1.01.1.01.1.16.110	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SDLB	675,000,000	648,827,100	96.12	26,172,900	3.88	Sangat Tinggi	Efisiensi rapat, perjalanan dinas dalam daerah
63	1.01.1.01.1.16.113	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi	336,650,000	323,917,000	96.22	12,733,000	3.78	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
64	1.01.1.01.1.16.114	Pemberian Makanan Tambahan anak sekolah(PMTAS)	90,000,000	79,092,000	87.88	10,908,000	12.12	Tinggi	Sisa dari anggaran dengan kegiatan pengeluaran riil
65	1.01.1.01.1.16.120	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)	200,000,000	140,555,000	70.28	59,444,000	29.72	Sedang	Kegiatan dilaksanakan ditingkat Kabupaten sesuai standarisasi LCC, pencairan sesuai pelaksanaan riil kegiatan
66	1.01.1.01.1.16.147	Pengadaan Sarana dan Prasarana sekolah SD (DAK)	9,074,000,000	8,475,746,836	93.41	598,253,164	6.59	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
67	1.01.1.01.1.16.148	Sosialisasi BSM/PIP SD	40,000,000	31,902,500	79.76	8,097,500	20.24	Tinggi	Sisa operasional kegiatan dan perjalanan dinas luar daerah
68	1.01.1.01.1.16.149	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana SD dan SMP (DAK)	125,000,000	111,340,000	89.07	13,660,000	10.93	Tinggi	Sisa SPPD dalam daerah
69	1.01.1.01.1.16.164	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa SD/MI	150,000,000	125,665,500	83.78	24,334,500	16.22	Tinggi	Efisiensi honor panitla, foto copy, lembur dan perjalanan dinas
70	1.01.1.01.1.16.165	Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, Pembangunan Ruang Guru dan Penambahan Ruang Kelas	18,135,000,000	17,950,087,100	98.98	184,912,900	1.02	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
71	1.01.1.01.1.16.166	Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab SD Negeri	680,000,000	670,722,750	98.64	9,277,250	1.36	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan

No.	Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
72	1.01.1.01.1.16.168	Pengadaan Laboratorium Bahasa	710,000,000	657,171,114	92.56	52,828,886	7.44	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
73	1.01.1.01.1.16.169	Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Kabupaten Tegal	20,000,000	12,080,400	60.40	7,919,600	39.60	Rendah	Sisa dari anggaran dengan kegiatan pengeluaran riil dan kegiatan tidak berlanjut
74	1.01.1.01.1.16.170	Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SD Kabupaten	50,000,000	48,051,000	96.10	1,949,000	3.90	Sangat Tinggi	Pencairan dana sesuai kebutuhan
75	1.01.1.01.1.16.171	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tingkat SMP	20,000,000	19,955,000	99.78	45,000	0.23	Sangat Tinggi	Sisa penggunaan dana sesuai kebutuhan
76	1.01.1.01.1.16.172	Fasilitasi Sarana Implementasi Kurikulum 2013 SMP	200,000,000	196,707,910	98.35	3,292,090	1.65	Sangat Tinggi	Efisiensi operasional kegiatan
77	1.01.1.01.1.16.173	Pembuatan Media Pembelajaran SMP	20,000,000	17,980,550	89.90	2,019,450	10.10	Tinggi	Sisa penggunaan dana sesuai kebutuhan
78	1.01.1.01.1.16.174	Fasilitasi PPDB Online SMP	90,000,000	13,713,500	15.24	76,286,500	84.76	Sangat Rendah	Pengadaan aplikasi tidak dilaksanakan
79	1.01.1.01.1.16.175	Lomba Sekolah Sehat SMP	20,000,000	19,758,500	98.79	241,500	1.21	Sangat Tinggi	Sisa penggunaan dana sesuai kebutuhan
80	1.01.1.01.1.16.176	Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP	500,000,000	478,470,000	95.69	21,530,000	4.31	Sangat Tinggi	Penggunaan dana sesuai pelaksanaan kegiatan kebutuhan
81	1.01.1.01.1.16.177	Penataan Lingkungan dan Pembangunan Mushola SD Negeri	300,000,000	296,742,400	98.91	3,257,600	1.09	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
82	1.01.1.01.1.16.179	Rehab Sekolah Dasar Negeri	1,100,000,000	1,078,660,629	98.06	21,339,371	1.94	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
83	1.01.1.01.1.16.181	Pavingisasi / Penataan Lingkungan Sekolah Dasar Negeri	650,000,000	644,858,000	99.21	5,142,000	0.79	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
84	1.01.1.01.1.16.182	Pavingisasi / Penataan Lingkungan SMP Negeri 3 Margasari	200,000,000	196,630,250	98.32	3,369,750	1.68	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
85	1.01.1.01.1.16.184	Pembangunan RKB Sekolah Dasar Negeri	890,000,000	874,809,000	98.29	15,191,000	1.71	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
86	1.01.1.01.1.16.186	Pengadaan Drumband Sekolah Dasar Negeri	150,000,000	147,219,000	98.15	2,781,000	1.85	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
87	1.01.1.01.1.16.187	Penataan lingkungan SMP N 1 Warureja	150,000,000	147,574,000	98.38	2,426,000	1.62	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
88	1.01.1.01.1.16.188	Pembangunan Pagar SD N Dukuhjati Wetan 01	100,000,000	98,535,750	98.54	1,464,250	1.46	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
89	1.01.1.01.1.16.189	Pagar keliling dan Penataan lingkungan SDN 02 Sjarang Kidul	100,000,000	98,069,750	98.07	1,930,250	1.93	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
90	1.01.1.01.1.16.193	Ruang Perpustakaan SDN 04 KertayasaKec. Kramat	200,000,000	198,736,650	99.37	1,263,350	0.63	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
91	1.01.1.01.1.16.194	Meubelair Rumah pintar Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi	50,000,000	48,308,000	96.62	1,692,000	3.38	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
92	1.01.1.01.1.16.195	Pembangunan Toilet, Dapur dan Tempat Parkir SDN Lemahduwur 01 Kec. Adiwerna	100,000,000	98,632,750	98.63	1,367,250	1.37	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
93	1.01.1.01.1.16.196	Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 Talang Kecamatan Talang	200,000,000	197,942,800	98.97	2,057,200	1.03	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan

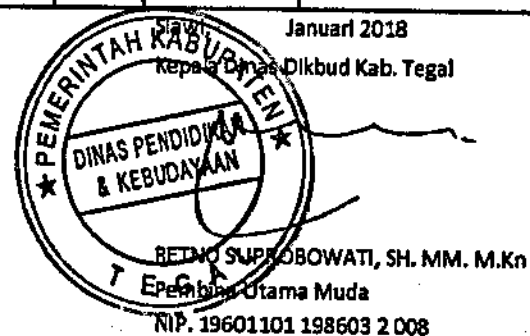
No.	Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
94	1.01.1.01.1.16.198	Rehab Ruang Kelas untuk pembangunan/pembuatan Aula SMP Negeri 2 Balapulang	200,000,000	197,438,250	98.72	2,561,750	1.28	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
95	1.01.1.01.1.16.200	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah SMP (DAK)	1,168,000,000	1,095,332,480	93.78	72,667,520	6.22	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
96	1.01.1.01.1.16.201	Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan SD Tahun 2016	197,328,000	197,328,000	100.00	-	-	Sangat Tinggi	-
97	1.01.1.01.1.16.202	Pembayaran Kegiatan Penataan Lingkungan SD Balapulang Kulon 05 Kec. Balapulang Tahun 2016	135,121,000	135,121,000	100.00	-	-	Sangat Tinggi	-
98	1.01.1.01.1.16.203	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Tahun 2016	162,840,000	162,840,000	100.00	-	-	Sangat Tinggi	-
99	1.01.1.01.1.16.204	Pengadaan Peralatan Komputer SMP N 1 adiwerna	150,000,000	146,790,000	97.86	3,210,000	2.14	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
10	2.16.1.01.1.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	375,000,000	366,188,900	97.65	8,811,100	2.35	Sangat Tinggi	
100	2.16.1.01.1.16.02	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	250,000,000	245,802,400	98.32	4,197,600	1.68	Sangat Tinggi	Nego LS cetak buku, uang lembur THL serta sisa SPPD
101	2.16.1.01.1.16.07	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	45,000,000	42,508,400	94.47	2,490,600	5.53	Sangat Tinggi	Sisa SPPD dan efisiensi honor lembur tenaga harian lepas
102	2.16.1.01.1.16.11	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	30,000,000	28,877,300	96.26	1,122,700	3.74	Sangat Tinggi	Sisa SPPD dan honor pengadaan
103	2.16.1.01.1.16.21	Studi Banding Situs Sejarah Purbakala di sangiran	50,000,000	48,999,800	98.00	1,000,200	2.00	Sangat Tinggi	Sisa SPPD dan bea penginapan serta honor pengadaan
11	2.16.1.01.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	20,000,000	17,574,000	87.87	2,426,000	12.13	Tinggi	
104	2.16.1.01.1.17.02	Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan	20,000,000	17,574,000	87.87	2,426,000	12.13	Tinggi	Sisa SPPD
12	1.01.1.01.1.18	Program Pendidikan Non Formal	2,520,000,000	2,442,188,050	96.91	77,891,950	3.09	Sangat Tinggi	
105	1.01.1.01.1.18.05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	500,000,000	497,823,000	99.56	2,177,000	0.44	Sangat Tinggi	SPPD luar daerah tidak di cairan
106	1.01.1.01.1.18.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	300,000,000	293,257,000	97.75	6,743,000	2.25	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
107	1.01.1.01.1.18.14	Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	150,000,000	149,274,500	99.52	725,500	0.48	Sangat Tinggi	Efisiensi kegiatan operasional panitia penyelenggara
108	1.01.1.01.1.18.15	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket B	80,000,000	67,397,000	84.25	12,603,000	15.75	Tinggi	Sisa Honor kepanitiaan UN tingkat kecamatan dan SPPD luar daerah yang tidak diambil
109	1.01.1.01.1.18.16	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C	100,000,000	89,538,000	89.53	10,470,000	10.47	Tinggi	Sisa Honor kepanitiaan UN tingkat kecamatan dan SPPD luar daerah yang tidak diambil
110	1.01.1.01.1.18.17	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A	20,000,000	19,247,000	96.24	753,000	3.77	Sangat Tinggi	Sisa Honor kepanitiaan US tingkat kecamatan dan SPPD luar daerah yang tidak diambil

No.	Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
111	1.01.101.1.18.25	Peningkatan Pendidikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	230,000,000	230,000,000	100.00	-	-	Sangat Tinggi	-
112	1.01.101.1.18.32	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A	60,000,000	60,000,000	100.00	-	-	Sangat Tinggi	-
113	1.01.101.1.18.33	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B	330,000,000	330,000,000	100.00	-	-	Sangat Tinggi	-
114	1.01.101.1.18.34	Penyelenggaraan Pendidikan Paket C	565,000,000	556,647,000	98.52	8,353,000	1.48	Sangat Tinggi	SPPD luar daerah tidak di cairan
115	1.01.101.1.18.49	Peningkatan Sarana Prasarana Sanggar Kegiatan Bersama (SKB)	135,000,000	131,852,300	97.67	3,147,700	2.33	Sangat Tinggi	Selisih kontraktual / lelang pengadaan
116	1.01.101.1.18.51	Fasilitasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal	50,000,000	17,080,250	34.16	32,919,750	65.84	Sangat Rendah	Sisa perjalanan dinas luar daerah
117	1.01.101.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,239,100,000	4,003,109,288	94.43	235,990,712	5.57	Sangat Tinggi	
117	1.01.101.1.20.13	Diklat Teknik Calon Kepala Sekolah SD, SMP	450,000,000	424,777,688	94.40	25,222,312	5.60	Sangat Tinggi	Efisiensi sewa hotel, makan minum dan sewa gedung tdk dicairkan karena pelaksanaan bertempat di SMK N.2 Slawi
118	1.01.101.1.20.15	Kegiatan Sertifikasi Guru	34,100,000	32,174,250	94.35	1,925,750	5.65	Sangat Tinggi	Efisiensi SPPD karena berkurang
119	1.01.101.1.20.20	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	100,000,000	53,981,000	53.98	46,019,000	46.02	Rendah	Honor tim penilai tdk dibayar sesuai DPA karena di ada aturan di Perubunya
120	1.01.101.1.20.22	Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	20,000,000	17,500,000	87.50	2,500,000	12.50	Tinggi	Sisa SPPD karena perjalanan dinas dim daerah tim berkurang
121	1.01.101.1.20.23	Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Pendidik, Tenaga Kependidikan	175,000,000	143,065,500	81.75	31,934,500	18.25	Tinggi	Sisa SPPD dan efisiensi makan minum
122	1.01.101.1.20.25	Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan	20,000,000	17,009,500	85.05	2,990,500	14.95	Tinggi	SPPD dalam daerah tidak diambil
123	1.01.101.1.20.27	Jambore PNFI	100,000,000	73,600,000	73.60	26,400,000	26.40	Sedang	Cabang lomba tdk dilombakan semua karena hanya mengikuti cabang lomba yang di rencanakan dari Propinsi
124	1.01.101.1.20.28	OSN (Olimpiade Sains Nasional)	15,000,000	11,580,000	77.20	3,420,000	22.80	Tinggi	Sisa SPPD dan efisiensi operasional kegiatan / rapat-rapat
125	1.01.101.1.20.29	Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri	2,896,000,000	2,880,000,000	99.45	16,000,000	0.55	Sangat Tinggi	Datanya ada tapi orangnya sdh meninggal, tdk aktif
126	1.01.101.1.20.39	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	50,000,000	49,545,000	99.09	455,000	0.91	Sangat Tinggi	Sisa SPPD karena perjalanan luar daerah tdk dicairkan
127	1.01.101.1.20.40	Diklat Fungsional Pengawas Sekolah	125,000,000	121,270,850	97.02	3,729,150	2.98	Sangat Tinggi	Belanja cetak sertifikat tdk diambil karena tdk ada bukti pembayaran
128	1.01.101.1.20.42	Rapat Koordinasi Dengan Satuan Pendidikan dan UPTD	20,000,000	16,832,500	84.16	3,167,500	15.84	Tinggi	SPPD dalam daerah tidak dicairkan karena frekwensi perjalanan berkurang
129	1.01.101.1.20.43	Penanganan Kasus Guru (TK, SD, SMP)	20,000,000	9,175,000	45.88	10,825,000	54.13	Sangat Rendah	Efisiensi karena honor sekretariat kasus Indisipliner tdk dicairkan karena di Dinas sifatnya cuma pembinaan
130	1.01.101.1.20.45	Penilaian Kinerja Guru Penilik	17,000,000	15,620,000	91.88	1,380,000	8.12	Sangat Tinggi	Efisiensi makan minum dari peserta sosialisasi
131	1.01.101.1.20.47	Pemilihan Guru Prestasi	150,000,000	94,022,000	62.68	55,978,000	37.32	Rendah	Dana dikembalikan ke Kasda karena tidak ada peserta dari guru SMA / SMK
132	1.01.101.1.20.48	Pelatihan Instruktur Kursus	30,000,000	25,982,000	86.61	4,018,000	13.39	Tinggi	Peserta tdk sesuai dengan kuota yang direncanakan /berkurang

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	Status Kinerja	Permasalahan sisa anggaran yang ada
133	1.01.1.01.1.20.49	Pembayaran Keputusan Gugatan Perdata	17,000,000	16,974,000	99.85	26,000	0.15	Sangat Tinggi	Selisih hasil keputusan
134	2.13.1.01.1.21.12	Pengadaan Plagam UKA, SD, SMP	60,000,000	31,065,000	51.78	28,935,000	48.23	Rendah	Sisa pengadaan langsung dari pembuatan plagam realisasi lebih kecil dari perencanaan
135	4.03.1.01.1.21.30	Review Renstra SKPD	10,000,000	3,921,000	39.21	6,079,000	60.79	Sangat Rendah	SPPD luar daerah dan jasa Konsultasi tidak dicairkan
136	1.01.1.01.1.22.10	Manajemen dan Monitoring BOS	200,000,000	186,959,096	93.48	13,040,904	6.52	Sangat Tinggi	Efisiensi pelaksanaan dari operasional kegiatan
137	1.01.1.01.1.22.11	Pendataan Aset Dinas Dikbud	75,000,000	74,850,000	99.80	150,000	0.20	Sangat Tinggi	Sisa SPPD dalam daerah
138	1.01.1.01.1.22.12	Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan	80,000,000	67,768,000	84.71	12,232,000	15.29	Tinggi	Monitoring mengambil beberapa sekolah tertentu untuk sample sehingga ada efisiensi bea operasional kegiatan
139	1.01.1.01.1.22.13	Penunjang Pendataan Pendidikan	100,000,000	82,514,500	82.51	17,485,500	17.49	Tinggi	Sewa tempat dan nara sumber tidak direalisasi
140	1.01.1.01.1.22.15	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	299,331,000	125,239,953	41.84	174,091,047	58.16	Sangat Rendah	Efisiensi anggaran karena ada bantuan dari APBN untuk pelaksanaan UN
141	1.01.1.01.1.22.16	Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal	100,000,000	52,429,000	52.43	47,571,000	47.57	Rendah	Efisiensi anggaran karena ada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
142	1.01.1.01.1.22.17	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK, MA	250,000,000	107,479,150	42.99	142,520,850	57.01	Sangat Rendah	Akreditasi SMP mendapat bantuan dari APBN
143	1.01.1.01.1.22.18	Pengadaan Perangkat Backbone Dapodik	380,000,000	268,226,113	70.59	111,773,887	29.41	Sedang	selisih harga index barang dari E-furchersing dengan harga pasar dari pihak jasa ke tiga (penyedia)
144	1.01.1.01.1.22.20	Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan sertifikasi guru	142,166,000	129,368,500	91.00	12,797,500	9.00	Tinggi	Efisiensi makan minum ada pengurangan dalam kontrak dan honor nara sumber
		Total Capaian	59,961,793,000	56,612,657,952	94.41	3,349,135,048	5.59	Sangat Tinggi	

Keterangan :

1. Pencapaian Prosentasi Anggaran adalah = 94.41 %
(Jumlah Realisasi dibagi jumlah Anggaran kali 100)
2. Prosentasi Sisa Anggaran adalah = 5.59 %
(Jumlah Sisa Anggaran dibagi jumlah Anggaran kali 100)





**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2018**

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		1.310.925.000,00	588.489.000,00	442.627.000,00	300.189.000,00	2.642.230.000,00
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	10000 surat		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	12 bulan		118.750.000,00	201.000.000,00	155.250.000,00	0,00	475.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	13 bulan untuk 20 orang		111.202.000,00	111.174.000,00	111.174.000,00	111.180.000,00	444.730.000,00
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dikbud Kab. Tegal	12 Bulan		144.460.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01.1.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dikbud Kab. Tegal	1 tahun		119.690.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dikbud Kab. Tegal	1 Tahun		194.460.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dikpora Kab. Tegal	13 barang cetakan		86.810.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
1.01.1.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dikbud Kab. Tegal	12 bulan		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dikbud Kab. Tegal	12 bulan		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dikpora Kab. Tegal	12 Bulan		2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00	2.503.000,00	10.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dikpora Kab. Tegal	5500 orang		69.830.000,00	67.970.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00	250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dikpora Kab. Tegal	8 kali kegiatan		20.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dikpora Kab. Tegal	1 tahun		5.000.000,00	7.800.000,00	7.200.000,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor	Dikpora Kab. Tegal	12 bulan		71.320.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Biaya Operasional Kegiatan UPTD Dikpora Kecamatan dan SKB	Dikbud Kab. Tegal	19 (18 UPTD Dikbud dan 1 UPTD SKB)		184.404.000,00	114.786.000,00	100.404.000,00	100.406.000,00	500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD		515.481.000,00	2.952.090.000,00	107.429.000,00	0,00	3.575.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	10 Unit		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 unit		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kantor		166.850.000,00	12.650.000,00	20.500.000,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84 (9 Mobil, 75 Motor)		79.275.000,00	61.340.000,00	59.385.000,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72 Peralatan		20.356.000,00	22.100.000,00	27.544.000,00	0,00	70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17 UPTD Dikbud Kecamatan		119.000.000,00	2.856.000.000,00	0,00	0,00	2.975.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD		16.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket		16.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD		81.648.750,00	92.179.250,00	84.319.500,00	16.852.500,00	275.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kali		16.472.500,00	27.003.000,00	6.524.500,00	0,00	50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun		65.176.250,00	65.176.250,00	77.795.000,00	16.852.500,00	225.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		70		1.506.101.500,00	778.296.500,00	39.699.000,00	39.703.000,00	2.363.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan Kompetensi Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			33.041.000,00	16.959.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Penyempurnaan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70	Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal	Kabupaten Tegal	6 angkatan, 60 org, 100 org, 140 org, 150 org, 100 org dan 140 org		3.301.000,00	131.699.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94	Fasilitasi Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			30.225.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95	Lomba Sekolah Sehat PAUD Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			30.308.000,00	19.692.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 96	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			27.366.500,00	22.633.500,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 97	Penyempurnaan RKB TK Pembina Tarub dan TK Pembina Slawi	TK Pembina Tarub dan TK Pembina Slawi			150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 98	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Dinas Dikbud	3 Organisasi Mitra		42.937.000,00	107.063.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 99	Fasilitasi Bunda PAUD Kabupaten Tegal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 100	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD In Door	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 101	Pengadaan Meubelair PAUD Nonformal	Kecamatan Se-Kabupaten Tegal	10 PAUD		0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 102	Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD Out Door	Dinas Pendidikan			0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.01 . 1.01.01 . 15 . 103	Gebyar PAUD Non Formal Tingkat Kabupaten	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 105	Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 106	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 hari, 162 orang		46.590.000,00	53.410.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 107	Rintisan PAUD Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 108	Pendampingan DAK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31048 siswa		32.587.000,00	17.413.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 109	Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya pembinaan kepada organisasi PAUD		45.047.000,00	4.953.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 110	Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK Non Fisik)	Kabupaten Tegal			39.699.000,00	39.699.000,00	39.699.000,00	39.703.000,00	158.800.000,00
2.10 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		3		66.545.000,00	83.265.000,00	45.705.000,00	4.485.000,00	200.000.000,00
2.10 . 1.01.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dikbud Kab. Tegal	1 Tahun		66.545.000,00	83.265.000,00	45.705.000,00	4.485.000,00	200.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya		3		188.230.000,00	821.770.000,00	125.000.000,00	0,00	1.135.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Kabupaten Tegal	1 kali		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06	Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya	Provinsi Jawa Tengah	1 kali		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 10	Penjamasan Makam Amangkurat	Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal	1 kali		0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 12	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Peringatan Hari Jadi)	Kab Tegal	1 kali		28.230.000,00	771.770.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13	Pelatihan dan Pentas Seni Hari-hari Penting	Kabupaten Tegal	2 kali		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2.12 . 1.01.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan		3		17.422.000,00	7.578.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.12 . 1.01.01 . 15 . 10	Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi	Dikpora Kab. Tegal	1 kegiatan		17.422.000,00	7.578.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		3		236.000.000,00	1.030.500.000,00	86.000.000,00	57.500.000,00	1.410.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Kab Tegal	14 org		36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	42.000.000,00	150.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Kab. Banyumas	10 kali		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kab Tegal dan Prov. Jawa Tengah	120 orang		0,00	84.500.000,00	0,00	15.500.000,00	100.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kab Tegal & Prov. Jawa Tengah	1 kali		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 14	Pemeliharaan makam-makam bersejarah	Kabupaten Tegal	30 lokasi		0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 22	Lomba Karya Tulis Ilmiah Cagar Budaya	Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah	70 orang		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 23	Penyelenggaraan Lawatan Sejarah di Kabupaten Tegal dan Tingkat Propinsi	Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah	1 paket		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 24	Bimbingan Teknis Juru Pelihara	Kabupaten Tegal	30 orang		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 25	Dialog Budaya dan Tradisi	Kabupaten Tegal	1 kall		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16 . 26	Rehab Makam Suroponolawen	Kabupaten Tegal	1 lokasi		0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		6 ruang		1.392.000.000,00	38.374.437.000,00	265.000.000,00	0,00	40.031.437.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	Kabupaten Tegal	34 Sekolah		0,00	725.000.000,00	0,00	0,00	725.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 61	Ujian Nasional SMP / MTs	Kabupaten Tegal		3	425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 64	Managemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Dinas Dikbud Kab. Tegal		3	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten	Dikbud Kab. Tegal	13 Lomba		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Regrouping SD	Dikpora Kab. Tegal	10 sekolah	3	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84	Penataan Lingkungan Sekolah SD dan SMP	Kabupaten Tegal	1 Tahun		0,00	3.850.000.000,00	0,00	0,00	3.850.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Pengadaan Peralatan TIK SMP	SMP Kabupaten Tegal	1 Tahun		0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Pengadaan TIK SMP (DAK)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal	Dikpora Kab. Tegal	7 Lomba, 870 peserta	3	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP	Dikpora Kab. Tegal	5 Mapel UN, 485 orang	3	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas	Dikpora Kab. Tegal	1 Hari, 150 orang	3	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP	Dikpora Kab. Tegal	1 Hari, 106 peserta	3	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Adiwiyata Sekolah SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal	1 Tahun		0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP	Dikpora Kab. Tegal	1 kali 175 peserta dan 1 kali 100 orang	3	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Pelatihan Kurikulum SD	Dikpora Kab. Tegal	2 Hari (160 Orang)	3	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB	Dikpora Kab. Tegal	3 Mapel ,27.100 siswa		475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Dinas Dikpora Kab. Tegal	1 Tahun		0,00	420.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi)	Dikpora Kab. Tegal	4 Jenis macam Lomba	3	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148	Sosialisasi BSM / PIP SD	Dikpora Kab. Tegal	19 (18 kecamatan dan 1 kabupaten)	3	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164	Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa SD / MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikpora	5 kegiatan (15 Lomba)		0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166	Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab SD Negeri	Dikpora	1 Tahun		0,00	1.110.000.000,00	0,00	0,00	1.110.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168	Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP (DAK)	Dinas Dikpora Kabupaten Tegal	1 tahun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169	Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Kabupaten Tegal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal	1 Tahun	3	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170	Adiwiyata Sekolah SD	Dinas Kesehatan	1 Tahun		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Dinas Dikpora	1 kali, 212 peserta	3	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172	Implementasi Kurtilas	Dinas Kesehatan	1 Tahun		0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173	Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP	Dinas Dikpora Kab. Tegal	1 kali 106 orang	3	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174	Sosialisasi dan Pelatihani PPDB Online SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Te	120 Orang	3	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176	Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP	Dinas Dikpora Kab. Tegal	2057 siswa kurang Mampu		12.000.000,00	988.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 203	Pembangunan / Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP	Dinas Dikbud			0,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 206	Pavingisasi Sekolah SD	Dinas Dikbud	11 Sekolah Dasar		0,00	932.187.000,00	0,00	0,00	932.187.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 249	Pembangunan Pagar Keliling Sekolah SD dan SMP				0,00	951.250.000,00	0,00	0,00	951.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 250	Penataan Lingkungan Sekolah SD dan SMP (DAK)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 251	Pembangunan Sanitasi Sekolah SD				0,00	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 252	Pengembangan Kegiatan 11 Mapel MGMP SMP Kabupaten Tegal				0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 255	Pengadaan Sarana dan Prasarana SD (DAK Fisik)	SD Negeri Kabupaten Tegal		4	0,00	6.870.000.000,00	0,00	0,00	6.870.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 256	Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK Fisik)	SMP Negeri Kabupaten Tegal		4	0,00	1.183.000.000,00	0,00	0,00	1.183.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		3		70.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	0,00	370.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Kab Tegal	1 paket		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Nasional	1 kali		0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17 . 11	Pembuatan Perda Tentang Cagar Budaya	Kabupaten Tegal	1 kali		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal		98		2.842.410.000,00	2.108.590.000,00	40.000.000,00	0,00	4.991.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	Kecamatan Se-Kabupaten Tegal	22 Lembaga	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Kabupaten Tegal	22 Unit		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	Kabupaten Tegal	4300 Warga Belajar		49.410.000,00	60.590.000,00	40.000.000,00	0,00	150.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket B	Dinas Dikbud			80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C	Dinas Dikbud			100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A	Dinas Dikbud			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B	Dinas Dikbud Kab. Tegal	360 Warga Belajar	3	0,00	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19	Penyelenggaraan Pendidikan Paket C	Dinas Dikbud Kab. Tegal	263 Warga Belajar	3	263.000.000,00	263.000.000,00	0,00	0,00	526.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A	Dinas Dikbud Kab. Tegal	6 Lembaga		0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Desa Vokasi	Dikpora Kab. Tegal	1 paket		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	Peningkatan Pendidikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kabupaten Tegal	23 Lembaga	3	0,00	345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27	Kelompok Belajar Usaha (KBU)	Kabupaten Tegal	5 Lembaga	3	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36	Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kabupaten Tegal	72 Orang	3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 37	Fasilitasi Teknis Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Kabupaten Tegal	5 Lembaga	3	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41	Pengembangan Manajemen Desa Vokasi	Kabupaten Tegal	10 Lembaga PKBM	3	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 51	Fasilitasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Kabupaten Tegal	53 Orang	3	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 52	Managemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Dinas Dikbud Kab. Tegal	33 Lembaga	3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 53	Penyempurnaan Gedung PKBM	Dinas Dikbud	3 Lembaga PKBM		0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 54	Rehabilitasi Ruang Kelas SKB Kabupaten Tegal	Dinas Dikbud	1 Lembaga		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 55	Pengadaan Komputer UNBK PKBM	Dinas Dikbud	6 Lembaga PKBM		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		35		283.625.000,00	4.858.894.000,00	4.421.221.500,00	215.259.500,00	9.779.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP	Dikbud Kab. Tegal	3 hari		0,00	257.939.500,00	42.060.500,00	0,00	300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Diklat Fungsional Penilik Pendidikan Nonformal				100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Kegiatan Sertifikasi Guru	Dikbud Kab. Tegal	300 orang		2.120.000,00	23.459.500,00	2.161.000,00	2.259.500,00	30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	Dikpora Kab. Tegal	80 orang 1 kali		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)	Dikpora Kab. Tegal	80 orang, 2 hari		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23	Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Pendidik, Tenaga Kependidikan	Dikpora Kab. Tegal	7.810 orang		0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24	Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik	Dikbud Kab. Tegal	100 orang		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25	Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan	Dikpora Kab. Tegal	1 kali, 80 orang		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27	Jambore PNFI	Dikpora Kab. Tegal	3 hari, 50 orang		0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28	OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP	Dikpora Kab. Tegal	8 kali		0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29	Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri	Dikbud Kab. Tegal	1.204 orang		0,00	4.004.000.000,00	3.996.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30	Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD				0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33	Kesejahteraan Pendidik PAUD Non Formal				0,00	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	312.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Dikbud Kab. Tegal	3 hari, 90 orang		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42	Rapat Koordinasi Dengan Satuan Pendidikan dan UPTD	Dikpora Kab. Tegal	100 orang 3 kali		16.505.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43	Penanganan Kasus Guru (TK, SD, SMP)	Dikpora Kab. Tegal	100 %		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47	Pemilihan Guru Berprestasi	Dikpora Kab. Tegal	10 orang dan 2 Orang		0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49	Penilaian Kinerja Guru TK dan Penilik	Dinas Dikbud	65 orang		0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50	Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)				0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 51	Apresiasi PAUDNI PNFI	Dinas Dikbud Kab. Tegal	100%		0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		138 Unit		45.890.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 21 . 12	Pengadaan Piagam UKA, SD, SMP	Dikbud Kab. Tegal	30000 lembar	3	45.890.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.03 . 1.01.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		3		7.228.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.03 . 1.01.01 . 21 . 30	Review Renstra SKPD	Dikbud	1 Dokumen		7.228.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		8		825.269.300,00	4.279.060.450,00	200.053.250,00	36.117.000,00	5.340.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10	Manajemen dan Monitoring BOS	Dikbud Kab. Tegal	699 SD dan 106 SMP		177.139.000,00	82.431.000,00	100.930.000,00	0,00	360.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Pendataan Aset Dinas Dikpora	Dikbud Kab. Tegal			43.730.250,00	32.921.500,00	3.348.250,00	0,00	80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan	Dikbud Kab. Tegal	699 SD dan 106 SMP		51.147.000,00	69.853.000,00	4.500.000,00	24.500.000,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13	Penunjang Pendataan Pendidikan	Dikbud Kab. Tegal	699 SD dan 106 SMP		25.001.000,00	20.514.000,00	4.485.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal	Dikbud Kab. Tegal	1 tahun		52.303.000,00	24.470.000,00	11.610.000,00	11.617.000,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD, SD/MI dan SMP/MTS	Dinas Pendidikan	60 SD		46.026.000,00	77.974.000,00	26.000.000,00	0,00	150.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18	Managemen dan Pemeliharaan Perangkat Backbone Dapodik	dan Kebudayaan Dikbud Kab. Tegal	5 Unit		32.901.000,00	21.499.000,00	45.600.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21		Sarana Prasarana Scanning Hasil Ujian Sekolah			Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tegal	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22	Penyediaan Bahan Cetak Naskah Ujian Sekolah/Madrasah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	8.676 anak putus sekolah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23			Penuntasan Anak Putus Sekolah		47.022.050,00	3.949.397.950,00	3.580.000,00	0,00	4.000.000.000,00
JUMLAH					9.404.775.550,00	56.254.031.200,00	5.909.054.250,00	670.106.000,00	72.237.967.000,00

Slawi, 5 January 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008